

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN
TAHUN DI DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

(Suatu Studi Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak, Persepsi Pendidikan, dan
Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Program Wajib Belajar Sembilan Tahun)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

UMI WURYANI
D4E001066

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2002**

LEMBAR PERSETUJUAN
TESIS

NAMA PENULIS : UMI WURYANI

NIM : D4E001066

Tesis ini telah disetujui untuk diujikan:

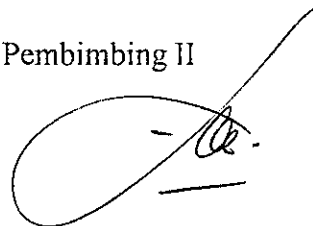
Tanggal 7 September 2002

Pembimbing I



Prof. Drs. Y. Warella, MPA. P.hD.

Pembimbing II



Dra. Susi Sulandari, M.Si.

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN
TAHUN DESA KEDUNGWARUKIDUL KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

(Suatu Studi Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak, Persepsi Pendidikan, dan
Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Program Wajib Belajar Sembilan Tahun)

Dipersiapkan dan disusun oleh

UMI WURYANI

D4E001066

telah dipertahankan di depan Tim Penguji

pada tanggal 15 September 2002

Susunan TIM Penguji

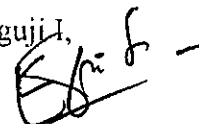
Ketua Penguji/ Pembimbing I,



Prof. Drs. Y. Warella, MPA. P.hD.

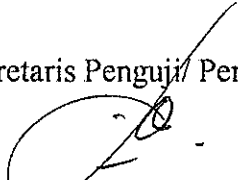
Anggota TIM Penguji lain:

Penguji I,



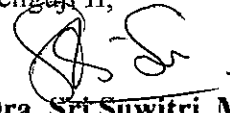
Dra. Endang Larasati, M.S.

Sekretaris Penguji/ Pembimbing II,



Dra. Susi Sulandari, M.Si.

Penguji II,



Dra. Sri Suwitri, M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Sain



Tanggal 15 September 2002

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro Semarang


Prof. Drs. Y. Warella, MPA. P.hD.

RINGKASAN

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Tanggung jawab orang tua dalam menyukseskan program tersebut terlihat pada partisipasinya. Partisipasi tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan orang tua tentang nilai anak baik nilai positif, meliputi kepuasan kebaikan, dan keuntungan; maupun nilai negatif, meliputi gangguan (*divalues*), ongkos, beban, kesulitan, dan kerugian. Pandangan orang tua tersebut akan berdampak pada rendahnya partisipasinya terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Adapun persepsi orang tua terhadap pendidikan merupakan suatu konsep pikir orang tua mengenai makna dan arti penting proses pendidikan anak-anak mereka. Jika persepsi orang tua terhadap pendidikan baik, akan menopang munculnya aspirasi yang tinggi sehingga kesadaran untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi akan besar pula. Program wajib belajar sembilan tahun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial. Orang tua yang memiliki ekonomi lemah pola pikir dan sikapnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan pendidikan anak bukan menjadi prioritas utama. Demikian pula dengan kondisi sosial orang tua, status sosial dan pendidikan orang tua yang rendah akan memandang bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Pandangan yang terpenting baginya adalah bahwa hidup seseorang yang paling esensial adalah mampu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Hasil pengujian dengan Rank Kendall's diperoleh hasil bahwa hubungan antara pandangan orang tua tentang nilai anak (X1) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,339 dengan taraf signifikansi 0,001 atau di bawah 0,05 (95%). Hubungan antara persepsi orang tua tentang pendidikan (X2) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,095 dengan taraf signifikansi 0,0277 atau di bawah 0,05 (95%). Hubungan kondisi sosial ekonomi (X3) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,087 dengan taraf signifikansi 0,0319 atau di bawah 0,05 (95%). Adapun hasil perhitungan hubungan secara bersama-sama antara X1, X2, dan X3 terhadap Y diperoleh angka sebesar 0,050. Setelah diuji tingkat kebenaran dengan nilai Chi Square diperoleh 15,114 dengan taraf signifikansi 0,05 (95%) nilai koefisiennya sebesar 5,991. Dengan demikian, hubungan antara pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi orang tua tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan program wajib belajar sembilan tahun secara bersama-sama memiliki hubungan yang positif. Implikasi penelitian ini bahwa pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi merupakan faktor yang amat penting untuk diperhatikan oleh semua komponen terkait dalam rangka menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

ABSTRAKSI

UMI WURYANI. Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Kedungwarukidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Magister Administrasi Publik. Universitas Diponegoro. 2002.

Kata Kunci : pendidikan, nilai anak, persepsi, kondisi sosial ekonomi

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Program ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen yang terkait, salah satunya adalah orang tua. Peran orang tua jelas amat besar dalam ikut andil menyukkseskan program ini. Berdasarkan kenyataan program ini belum memenuhi hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, program yang seharusnya selesai tahun 2004 akhirnya diundur lagi sampai tahun 2008 untuk menuntaskannya. Kekurangberhasilan program ini juga terjadi di Desa Kedungwarukidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandangan orang tua tentang nilai anak (X1), persepsi mereka tentang pendidikan (X2), dan kondisi sosial ekonomi (X3) terhadap Program Wajib Belajar Sembilan tahun (Y). Secara khusus adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran dan pandangan orang tua tentang nilai anak dan bagaimana hubungannya dengan keberhasilan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, untuk mengetahui bagaimana persepsi orang tua tentang pendidikan dan bagaimana hubungannya dengan keberhasilan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua dan bagaimana hubungannya dengan keberhasilan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran angket, observasi, dan wawancara. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa berdasarkan perhitungan dengan Rank Kendal's hubungan pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi secara bersama-sama terhadap Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diperoleh hasil 0,050. Berarti ada hubungan positif antara X1, X2, dan X3 terhadap Y atau semakin besar X1, X2, dan X3 akan semakin besar pengaruhnya terhadap Y, dan sebaliknya semakin kecil X1, X2, dan X3 semakin kecil pula pengaruhnya terhadap Y.

ABSTRACT

UMI WURYANI. *Analysis on Factors Influencing Nine Years Compulsory Education Program in Kedungwaru Kidul Village, Karangnyar Sub-district, Demak Regency.* Masters of Public Administration. Diponegoro University. 2002.

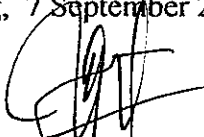
Keywords: *education, the value of children, perception, social economic condition.*

Nine Years Compulsory Education is a government's program aimed at enhancing the quality of Indonesian manpower. This program is an obligation for all related stakeholders, including parents. Their role is significant for the success of this program. However, this program has not been as successful as it was expected. Therefore, the program completion year which was targeted in 2004 was rescheduled until 2008, including in Kedungwaru Kidul village, Karanganyar sub-district, Demak regency. This research was intended to know the influence of three factors covering parents view on the value of their children (X1), their perception on education (X2), and their social economic condition (X3) over this Nine Year Compulsory Education Program (Y) in general. In particular it was intended to know the relation of each factor to the success of this Nine Year Compulsory Education. Data collection method employed were questionnaires, observation, and interview. The research findings, analyzed with Rank Kendall formula, show that the relation of the three variables covering the parents' view on the value of their children, their perception on education, and their social economic condition simultaneously over this Nine Year Compulsory Education Program was 0.050. It means that there were positive relations between X1, X2 and X3 to Y, or the greater X1, X2 and X3 are the greater also their relations to Y, and vice versa.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 7 September 2002



Umi Wuryani

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof. Y. Warella, P.hD. dan Dra. Susi Sulandari, M.Si. yang telah membimbing, mengarahkan, dan mencurahkan perhatiannya dalam penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Prof. Y. Warella, P.hD, Ketua Program Studi Manajemen Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan izin penelitian
2. Dosen Program Studi Manajemen Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah membekali berbagai ilmu,
3. berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama penyusunan tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 17
A. Landasan Teori.....	17
1. Implementasi Kebijakan	17
2. Hakikat Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.....	27
3. Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak.....	40

4. Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan	45
5. Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua	48
B. Hubungan Konsep Antarvariabel	53
1. Hubungan antara Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	53
2. Hubungan antara Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	53
3. Hubungan antara Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	54
4. Hubungan antara Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak, Persepsi tentang Pendidikan, dan Kondisi Sosial Ekonomi dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	55
C. Hipotesis	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Rancangan Penelitian	58
B. Fokus Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian	59
D. Variabel Penelitian	60
E. Sumber Data	62
F. Instrumen Penelitian	63
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	64
H. Teknik Pengumpulan Data	65
I. Teknik Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN	71
A. Deskripsi Wilayah, Masyarakat, dan Pendidikan	71
B. Analisis Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	74
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 130
A. Simpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
OLAHAN KOMPUTER	
- TABEL TUNGGAL	
- UJI HIPOTESIS	

DAFTAR TABEL

A. Tabel Tunggal

1. Tabel 1	11
2. Tabel 2	75
3. Tabel 3	76
4. Tabel 4	77
5. Tabel 5	78
6. Tabel 6	79
7. Tabel 7	80
8. Tabel 8	81
9. Tabel 9	82
10. Tabel 10	83
11. Tabel 11	84
12. Tabel 12	85
13. Tabel 13	86
14. Tabel 14	87
15. Tabel 15	88
16. Tabel 16	89
17. Tabel 17	90
18. Tabel 18	91
19. Tabel 19	92
20. Tabel 20	93

21. Tabel 21	94
22. Tabel 22	95
23. Tabel 23	96
24. Tabel 24	97
25. Tabel 25	98
26. Tabel 26	99
27. Tabel 27	100
28. Tabel 28	101
29. Tabel 29	102
30. Tabel 30	103
31. Tabel 31	104
32. Tabel 32	105
33. Tabel 33	106
34. Tabel 34	107
35. Tabel 35	108
36. Tabel 36	109
37. Tabel 37	110
38. Tabel 38	111
39. Tabel 39	112
40. Tabel 40	113
41. Tabel 41	114

B. Tabel Silang

1. Tabel 1	115
2. Tabel 2.....	116
3. Tabel 3	117
4. Tabel 4	118
5. Tabel 5	119
6. Tabel 6	122
7. Tabel 7	124
8. Tabel 8	127

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1	135
2. Lampiran 2	138
3. Lampiran 3	147
4. Lampiran 4	151
5. Lampiran 5	153
6. Lampiran 6	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan kehidupan di masa depan dalam era globalisasi di abad 21 ini telah membawa berbagai perubahan yang berlangsung dengan cepat terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan segala dampaknya. Oleh karena itu, lingkungan dalam situasi global mulai dirasakan, antara lain lingkungan yang merangsang pemikiran majemuk, lingkungan yang memerlukan sumber daya manusia yang menguasai Iptek, lingkungan yang menghormati seseorang yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan produktif, dan lingkungan yang lebih mengutamakan masyarakat “meritokrasi”, yaitu masyarakat yang lebih menghargai prestasi daripada status dan asal-usul (Surya, 2000:4).

Melihat kenyataan ini mau tidak mau bangsa Indonesia harus terjun dalam kancah tersebut, lengkap dengan segala konsekuensinya. Untuk menyiasati masalah ini bangsa Indonesia telah mengambil sikap dalam menghadapi percaturan itu. Hal ini terlihat dalam arah kebijaksanaan bidang pendidikan sebagaimana termaktup dalam GBHN 1999. Salah satu arah kebijaksanaannya adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya (GBHN, 1999:33).

Kebijakan pemerintah seperti yang tertuang dalam GBHN 1999 dilandasi adanya kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan, bahkan dalam negara berkembang dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan.

Pengembangan masalah sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Langkah yang dilakukan, antara lain memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan. Mengingat, maju mundurnya atau berkualitas tidaknya sumber daya manusia amat bergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan sebagai “agen” dan sekaligus “pencetak” sumber daya manusia.

Alasan lain pemerintah dengan mengedepankan pembangunan pendidikan karena melihat kenyataan bahwa pembangunan yang mengedepankan sektor ekonomi selama ini yang menjadi *policy* pemerintah, tidak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Data UNDP tentang *Human Development Index* (HDI) menunjukkan dari 174 negara, Indonesia ada pada posisi kurang menggembirakan yakni peringkat 109. Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya berada jauh di atasnya. Malaysia menduduki peringkat 53, Thailand peringkat 52, Brunai peringkat 36, dan Singapura peringkat 34 (Kompas, 29 September 2000). Rendahnya sumber daya manusia di Indonesia diperkuat pula oleh penelitian *The International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke 26 dari 27 negara peserta studi (Elley, 1992). Sementara untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi terhadap kemampuan matematika siswa SLTP menempatkan siswa Indonesia pada urutan ke-34

dari 38 negara, dan untuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berada pada urutan ke-32 dari 38 negara peserta (Nasir, 2002)

Pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia sekarang ini menggunakan empat strategi dasar. yakni, *pertama*, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, *kedua*, relevansi, *ketiga*, peningkatan kualitas, dan *keempat*, efisiensi. Secara umum strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi, yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan (Nasir, 2002).

Dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. Strategi ini perlu mendapatkan prioritas karena ternyata banyak anak-anak di Indonesia, terutama di pedesaan masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, terutama di SLTP. Di samping itu, masalah pemerataan pendidikan menurut Hadikusumo (1995:99) mencakup tiga aspek pokok, yaitu persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), aksesibilitas (*accessibility*), dan keadilan atau kewajaran (*equity*).

Pemerataan kesempatan berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Begitu pula dalam UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak membedakan warga negara menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Aksesibilitas artinya setiap orang tanpa memandang asal-usulnya memiliki akses (kesempatan masuk) yang sama ke dalam pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Adapun yang dimaksud keadilan di sini adalah perbedaan

perlakuan pada peserta didik sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Secara moral-etis adalah adil dan wajar apabila peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat, dan minatnya.

Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan, yaitu dengan penancangan program wajib belajar sembilan tahun yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan “melek huruf” dan masyarakat belajar.

Program wajib belajar sembilan tahun dianggap sebagai langkah yang strategis karena program ini merupakan awal bahwa manusia ditempatkan sebagai faktor terpenting untuk pengembangan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, arah pembangunan yang menuju prinsip *critical mass* di bidang pendidikan akan terwujud, yaitu suatu persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu.

Kebijakan pemerintah dalam penancangan program wajib sembilan tahun dilandasi adanya konsep bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pendidikan formal memiliki andil yang sangat besar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa jika seseorang berpendidikan lebih tinggi tentu akan memiliki pengetahuan, kemampuan, serta tata nilai tertentu yang memungkinkan mereka lebih mampu menyerap berbagai informasi termasuk ilmu pengetahuan. Pendidikan yang dimiliki seseorang mencerminkan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan

perlakuan pada peserta didik sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Secara moral-etis adalah adil dan wajar apabila peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat, dan minatnya.

Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan, yaitu dengan pencanangan program wajib belajar sembilan tahun yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan “melek huruf” dan masyarakat belajar.

Program wajib belajar sembilan tahun dianggap sebagai langkah yang strategis karena program ini merupakan awal bahwa manusia ditempatkan sebagai faktor terpenting untuk pengembangan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, arah pembangunan yang menuju prinsip *critical mass* di bidang pendidikan akan terwujud, yaitu suatu persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu.

Kebijakan pemerintah dalam pencanangan program wajib sembilan tahun dilandasi adanya konsep bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pendidikan formal memiliki andil yang sangat besar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa jika seseorang berpendidikan lebih tinggi tentu akan memiliki pengetahuan, kemampuan, serta tata nilai tertentu yang memungkinkan mereka lebih mampu menyerap berbagai informasi termasuk ilmu pengetahuan. Pendidikan yang dimiliki seseorang mencerminkan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan

makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula kemampuan menyerap ilmu dan teknologi atau nilai-nilai baru.

Program wajib belajar sembilan tahun memiliki bobot yang berarti dalam kaitannya dengan upaya pengembangan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan bangsa Indonesia. Sesuai pendapat Ahmady (1994) bahwa pendidikan dasar sembilan tahun mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas karena pada jenjang pendidikan dasar inilah kemampuan dan keterampilan dasar dikembangkan pada peserta didik, baik sebagai bekal atau pendidikan lanjutan maupun untuk terjun ke masyarakat.

Keberhasilan dalam pendidikan dasar akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan sebagai basis ekologi bagi tumbuhnya bibit-bibit unggul. Dengan demikian, warga bangsa Indonesia menapakkan tangga pendidikan bukan lagi pendidikan SD, melainkan di jenjang SLTP sehingga kemampuan dasar rata-rata bangsa kita dapat naik setingkat lagi.

Program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah merupakan kelanjutan dari program-program pendidikan sebelumnya. Program pendidikan dengan penekanan peningkatan sumber daya manusia sebenarnya telah diantisipasi sejak tahun 70-an. Namun, program wajib belajar baru dimulai tahun 1983 dengan pencanangan wajib belajar enam tahun, yakni untuk usia 7-12 tahun secara nasional. Suksesnya program tersebut akhirnya memotivasi pemerintah untuk melanjutkan program wajib belajar menjadi sembilan tahun sejak tahun 1994 yang lalu.

Program tersebut sekaligus untuk menjawab dinamika perkembangan zaman yang terus berkembang.

Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep "pendidikan dasar untuk semua" (*universal basic education*), yang pada hakikatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Tujuan yang ingin dicapai dengan program ini adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Di samping itu, program wajib belajar 9 tahun memiliki empat ciri utama: (1) tidak dilakukan melalui paksaan tetapi himbauan, (2) tidak memiliki sanksi hukum, tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, (3) tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, (4) keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 7-14 tahun.

Program wajib belajar sembilan tahun sifatnya adalah anjuran, tetapi program ini hendaknya memiliki kekuatan yang mampu mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pada gilirannya program ini mampu menuntaskan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan sampai di SLTP. Sementara itu, orang tua yang memiliki anak usia sekolah dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya minimal pada jenjang tersebut. Meskipun para orang tua yang tidak mengindahkan program ini tidak mendapatkan sanksi hukum, diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menyukseskan program ini. Tanggung jawab moral ini tidak semata-mata untuk pendidikan anaknya, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam pembangunan.

Selain faktor yang sifatnya perspektif, ada latar belakang lain yang mendasari pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun, antara lain faktor geografis, perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, dan sarana serta prasarana pendidikan.

Faktor geografis yang mendasari karena adanya kenyataan bahwa rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang luar biasa luasnya dan terebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Dengan tersebarnya pulau-pulau, mereka sebagian masih hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan yang tradisional. Oleh karena itu, sebagian besar mereka yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Keadaan seperti ini merintangai tersebarluasnya kesempatan pendidikan secara merata. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ada suatu kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pendidikan sampai ke jenjang SLTP, bahkan sebagian lagi ada yang belum lulus SD. Masalah ini bukan karena anak tidak mau, tetapi karena letak tempat tinggal mereka yang tak mungkin dijangkau sarana pendidikan. Wilayah seperti itu seringkali tidak memungkinkan berlangsungnya usaha pendidikan secara baik, di samping faktor geografis juga susah menanamkan pengertian tentang pentingnya pendidikan karena pola hidup yang terbelakang.

Berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat di Indonesia 80% sebagian besar adalah masyarakat petani. Namun, sebenarnya jumlah tersebut hanya sebelas juta kepala keluarga yang mempunyai tanah sekitar setengah hektar, enam juta hanya seperempat hektar, bahkan lebih banyak lagi yang tak memiliki tanah garapan atau hanya sebagai buruh tani (Sastrosupono, 1984:18). Dalam kondisi seperti itu kondisi perekonomian

mereka tentu saja masih banyak dijumpai keluarga prasejahtera atau mungkin hanya keluarga sejahtera satu. Padahal, rata-rata mereka mempunyai anak tiga atau lima sehingga sebagian besar mereka dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Masyarakat yang berkategori miskin, tentu saja pikiran dan perbuatan lebih terpusat pada masalah pangan dan kerja untuk sesuap nasi demi mempertahankan hidup. Soal pendidikan dengan sendirinya tidak mendapatkan perhatian sewajarnya, bahkan dianggap tidak penting. Oleh karena itu, aspirasi mereka tentang pendidikan akan rendah karena adanya faktor biaya.

Tersendatnya dan tak terjangkaunya masyarakat dari masalah pendidikan ternyata juga disebabkan oleh tradisi masyarakat yang terbelakang. Contoh, anggapan masyarakat bahwa menyekolahkan anak akan merugikan keluarga. Alasannya adalah dengan sekolah anak-anak akan malas kerja, tak lagi dapat membantu orang tua di bawah atau pekarangan, menjadi pandai dan akhirnya berani kepada orang tua, atau bersekolah akhirnya juga akan menganggur karena mencari pekerjaan amat sulit, sementara banyak sarjana yang masih menganggur.

Alasan seperti itu selalu mewarnai pola pandang para masyarakat pedesaan yang pekerjaannya sebagai petani. Sebagai masyarakat petani tenaga kerja sangat penting, anak-anak juga merupakan tenaga kerja bagi keluarga yang bersangkutan. Tradisi bertani, berladang, dan bercocok tanam lainnya melahirkan suatu kebiasaan menggunakan anak istri sebagai tenaga kerja murah. Dengan demikian, akhirnya anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah.

Perkembangan berikutnya memang mereka mengerti tentang perkembangan zaman. Akan tetapi, mereka masih tetap beranggapan bahwa asal anak-anak mereka

sudah bisa membaca dan menulis masalah sekolah sudah cukup dan tidak perlu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan anak perempuan akan lebih parah lagi keadaannya, mereka tidak mendapatkan kesempatan seluas anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan disekolahkan tidak ada manfaatnya sebab biarpun bersekolah tinggi akhirnya akan kembali juga, yaitu tugasnya sebagai istri yang harus di dapur dan beranak. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau di daerah di pedesaan yang sebenarnya masih dalam usia sekolah terpaksa harus dinikahkan. Ditambah lagi adanya alasan bahwa tanggung jawab dalam keluarga adalah laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga, sementara pihak perempuan hanya mengikuti saja.

Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun, yaitu (1) lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat; (2) program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi; (3) semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 tahun, akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa; (5) peningkatan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun (Daliyo, 1998:2).

Ada empat kendala yang sudah diantisipasi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program wajib belajar 9 tahun, yaitu (1) secara kuantitatif target yang harus dikejar sangat besar terutama karena besarnya jumlah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP; (2) tingkat partisipasi sekolah pada usia SMP rendah dibandingkan dengan usia SD; (3) tingkat meneruskan dari SD ke SMP rendah,

disamping rendahnya tingkat *drop out* baik di SD maupun SMP; (4) besarnya jumlah lulusan SD yang tidak meneruskan ke SMP membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa memasuki pasar kerja (Daliyo, 1998:3).

Pencapaian sasaran program wajib belajar 9 tahun, pemerintah telah menyusun strategi, antara lain meningkatkan jumlah dan daya tampung SMP, mengangkat guru baru, menyediakan lebih banyak sarana belajar, mengajukan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, membebaskan uang sekolah dan mensubsidi sekolah swasta. Strategi lainnya yang sangat penting adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan alternatif. Strategi pendidikan alternatif ini didasarkan oleh adanya pertimbangan bahwa meskipun kapasitas sekolah sudah ditingkatkan, masih banyak anak usia sekolah yang belum tertampung, antara lain karena miskin dan tidak mampu membiayai sekolah.

Sistem pendidikan alternatif, di samping diimplementasikan melalui sekolah biasa, dilakukan melalui beberapa tipe sekolah nonkonvensional. Sekolah nonkonvensional ini adalah: (1) SMP Kecil, yang dibangun untuk daerah terpencil atau yang jarang penduduknya; (2) SMP Terbuka, untuk anak-anak usia SMP yang tidak mampu masuk SMP biasa; (3) Program Paket A dan Paket B yang setaraf SMP (tanpa mengenal batas umur); (4) sekolah-sekolah agama yang disamakan tarafnya dengan SMP umum.

Berbagai strategi telah diterapkan dan berbagai kemungkinan kendala yang menghambat juga telah diantisipasi. Namun demikian, setelah delapan tahun berjalan, gerakan Wajib 9 tahun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi gambaran jumlah anak putus sekolah masih sangat besar

dibandingkan mereka yang bisa terus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian 1995-1999 ternyata pencapaian kelulusan hanya 26,39% untuk perempuan dan 30,57% untuk laki-laki. (Susena, 1997).

Alasan lain yang melatarbelakangi penulis mengangkat masalah ini adalah bahwa berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan diperoleh data empiris sebagai berikut. Berdasarkan daftar monografi pada tahun 2001 jumlah anak usia sekolah (7-15) di desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Demak terlihat seperti berikut ini.

TABEL 1
KEADAAN ANAK USIA SEKOLAH (7-15)
DI DESA KEDUNGWARUKIDUL
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2001

Jumlah penduduk	: 5345
Jumlah KK	: 1467
Jumlah rumah	: 1125
Jumlah anak usia sekolah (7-15)	: 985

RW	ANAK TIDAK TAMAT SD	ANAK TAMAT SD	ANAK TIDAK MELANJUTKAN SLTP	JUMLAH
I	15	146	26	187
II	21	144	59	224
III	23	176	48	247
IV	24	114	46	184
V	20	106	17	143
	103 (10,45%)	686 (69,94%)	196 (19,89%)	985 (100%)

Sumber Data Monografi Desa (Mei 2002)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa anak usia sekolah (7-15) di desa kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Demak yang berjumlah 985 masih ditemukan anak yang tidak tamat SD dan tidak melanjutkan SLTP. Anak yang tidak tamat SD berjumlah 103 (10,45%) dan anak yang tidak melanjutkan SLTP 196 (19,89%). Hal ini berarti masih 30 % lebih anak yang tidak melanjutkan sampai pada jenjang SD dan SLTP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun masih belum memenuhi harapan.

Besarnya jumlah anak yang tidak tamat SD dan tidak melanjutkan SLTP, yakni sekitar 30% mengindikasikan bahwa program wajib belajar sembilan tahun belum mencapai hasil yang optimal. Artinya, target yang direncanakan belum sepenuhnya terpenuhi. Target yang dimaksud adalah bahwa pada tahun 2004 diharapkan penuntasan program tersebut telah berakhir. Mengingat sampai pada saat ini target tersebut belum tercapai maka pemerintah akhirnya mengundur program tersebut sampai pada tahun 2008 sehingga mundur empat tahun dari target semula.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Program tersebut didukung oleh adanya penetapan berbagai kebijakan yang mendukung. Kenyataan tampak berbagai kebijakan dan penunjang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun terus diupayakan pengadaannya oleh pemerintah, baik sarana maupun prasarana pendidikan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah melalui APBN telah menyediakan

biaya operasional sekolah yang dikenal dengan Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) atau Operasional Pemeliharaan Fasilitas (OPF). Bahkan, dalam rangka menghadapi krisis moneter yang datang saat program ini berlangsung, pemerintah juga telah mengantisipasi dengan program baru, yaitu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Dana Bantuan Operasional. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut diharapkan program ini dapat mencapai target tepat pada waktunya, yakni menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun sampai 2004 (Dikbud, 1999).

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani masalah keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun memang besar. Namun, kenyataan yang menunjukkan bahwa hasil yang dicapai belum menunjukkan harapan. Artinya, target ketuntasan program yang dijadwalkan sampai tahun 2004 terpaksa meleset sehingga terpaksa diundur sampai 2008. Hal ini didasari alasan bahwa hingga tahun 2001 keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun secara nasional baru mencapai 76,06% (Puslit Diknas 2001).

Secara lebih sempit lagi jumlah anak sekolah di Jawa Tengah yang tidak tamat SD dan tidak melanjutkan SLTP masih sekitar 525.000 orang. Besarnya jumlah tersebut memperlihatkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) di tingkat Jawa Tengah juga masih belum optimal (Puslit Diknas 2001).

Kekurangoptimalan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun tidak saja di tangan pemerintah. Banyak masalah yang dihadapi dalam menangani masalah ini, baik masalah alam, sosial budaya, dan masyarakat. Namun, dari sekian masalah tersebut sebenarnya yang menjadi faktor penentunya adalah faktor masyarakat. Mengingat, masyarakatlah yang menjadi titik utama dalam menentukan segalanya. Jika

masyarakat telah memiliki pola pikir dan motivasi yang baik dalam berpartisipasi penyuksesan program ini secara sendirinya akan mampu menanggulangi faktor-faktor lainnya.

Besarnya partisipasi masyarakat dalam menyukkseskan program ini amat menentukan. Partisipasi tersebut terlihat dalam kepdulian dan perhatiannya dalam masalah pendidikan. Orang tua yang peduli tentu akan memberikan perhatian yang besar dalam menyekolahkan anaknya. Perhatian tersebut akan diwujudkan dalam sikap, pola pandang, dan dorongan yang diberikan kepada anaknya.

Keadaan itulah yang mendorong dilakukannya penelitian ini untuk menggali secara mendalam mengenai kurangberhasilan program wajib pendidikan sembilan tahun di Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Demak dengan memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya anak tidak melanjutkan dan putus sekolah, terutama dilihat dari dimensi kondisi dan latar belakang orang tua. Bertolak dari berbagai argumen tersebut, permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini secara umum adalah Bagaimanakah pengaruh pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi terhadap program wajib belajar sembilan tahun? Adapun secara khusus permasalahan tersebut dapat penulis rinci sebagai berikut.

1. Apakah ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Desa Kedungwarukidul dipengaruhi oleh pandangan orang tua tentang nilai anak ?
2. Apakah ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Desa Kedungwarukidul dipengaruhi oleh persepsi orang tua tentang pendidikan ?
3. Apakah ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Desa Kedungwarukidul dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orang tua ?

4. Apakah ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Desa Kedungwarukidul dipengaruhi oleh pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi secara bersama-sama ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai secara umum adalah untuk mengetahui pengaruh pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi terhadap ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Desa Kedungwarukidul. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini penulis jabarkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran dan pandangan orang tua tentang nilai anak dan bagaimana hubungannya dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi orang tua tentang pendidikan dan bagaimana hubungannya dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.
3. Untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua bagaimana hubungannya dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun. bagaimana hubungannya dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.
4. Untuk mengetahui gambaran pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi serta bagaimana hubungannya dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan secara umum penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kendala partisipasi pendidikan orang tua pada jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang terjadi dalam latar masyarakat desa. Di samping itu, temuan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi tim koordinasi wajib belajar pendidikan sembilan tahun sehingga dapat menentukan langkah dan tindakan dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan. Adapun kegunaan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat memberikan informasi faktual pengaruh pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi secara bersama-sama terhadap program wajib belajar sembilan tahun
2. Orang tua, penelitian ini dapat memberikan masukan agar mereka mengubah pandangannya tentang nilai anak dan visi pendidikan demi menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.
3. Bagi praktisi dan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, penelitian ini akan memberikan masukan agar mereka ikut memikirkan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut
4. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Agar dapat memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu perlu mengetahui maksud yang terkandung di dalamnya. Ada dua konsep utama yang harus dimengerti secara benar. *Pertama*, adalah konsep tentang implementasi dan *kedua* adalah konsep tentang kebijakan publik. Namun, untuk memudahkan dalam memahami dua konsep besar itu (implementasi dan kebijakan publik) maka pembahasan konseptual tersebut akan dimulai dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan dan kemudian baru kedua konsep itu dipahami secara utuh.

Beberapa pendapat sebagaimana ditulis oleh M. Irfan Islamy dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (2001:15-18) dikatakan bahwa kebijaksanaan (*policy*) diberi arti bermacam-macam. Harol D. Hasswell dan Abraham Kaplan memberikan arti bahwa kebijakan sebagai “Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik yang terarah”. Carl J. Friedrich mendefinisikan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Thomas R Dye memberikan batasan pula bahwa kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan. Lebih lanjut dikatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Tak jauh dari batasan tersebut George C. Edward III juga mendefinisikan bahwa kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan/ tidak dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan negara itu berupa sasaran/ tujuan program-program pemerintah. Kebijakan tersebut dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatannya dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan, atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya.

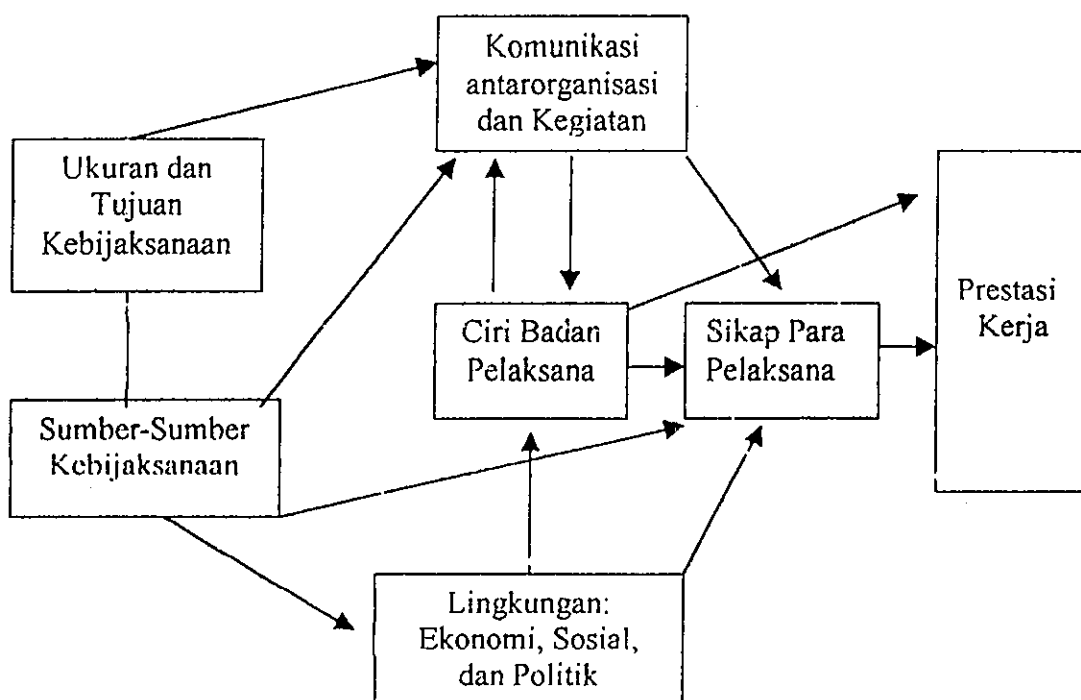
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk dilaksanakan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Pelaksanaan kebijakan sering diistilahkan dengan implementasi. Implementasi kebijaksanaan menurut Kamus Webster berarti suatu proses melaksanakan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, dan dekrit presiden). Implementasi kebijaksanaan itu sendiri harus menyediakan sarana untuk melaksanakannya sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Lester James P. (1987:19) implementasi kebijakan publik dapat dikonseptualisasi sebagai suatu proses suatu hasil (*out put*) dan sebagai suatu akibat (*out comes*) sebagai proses atau suatu rangkaian keputusan atributif awal dari legislatif pusat ke dalam suatu akibat. Dengan

demikian, ciri esensial dari proses implementasi adalah *performance* yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil, implementasi menyangkut tingkatan seberapa jauh tujuan yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan dan sebagai akibat. Implementasi mengandung implikasi adanya beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah besar yang menjadi sasaran program atau kebijakan. Lebih tegas dikatakan oleh A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier bahwa implementasi kebijaksanaan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijaksanaan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahrkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Adapun teori implementasi menurut Van Mester dan Van Horn menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya teori itu juga menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan

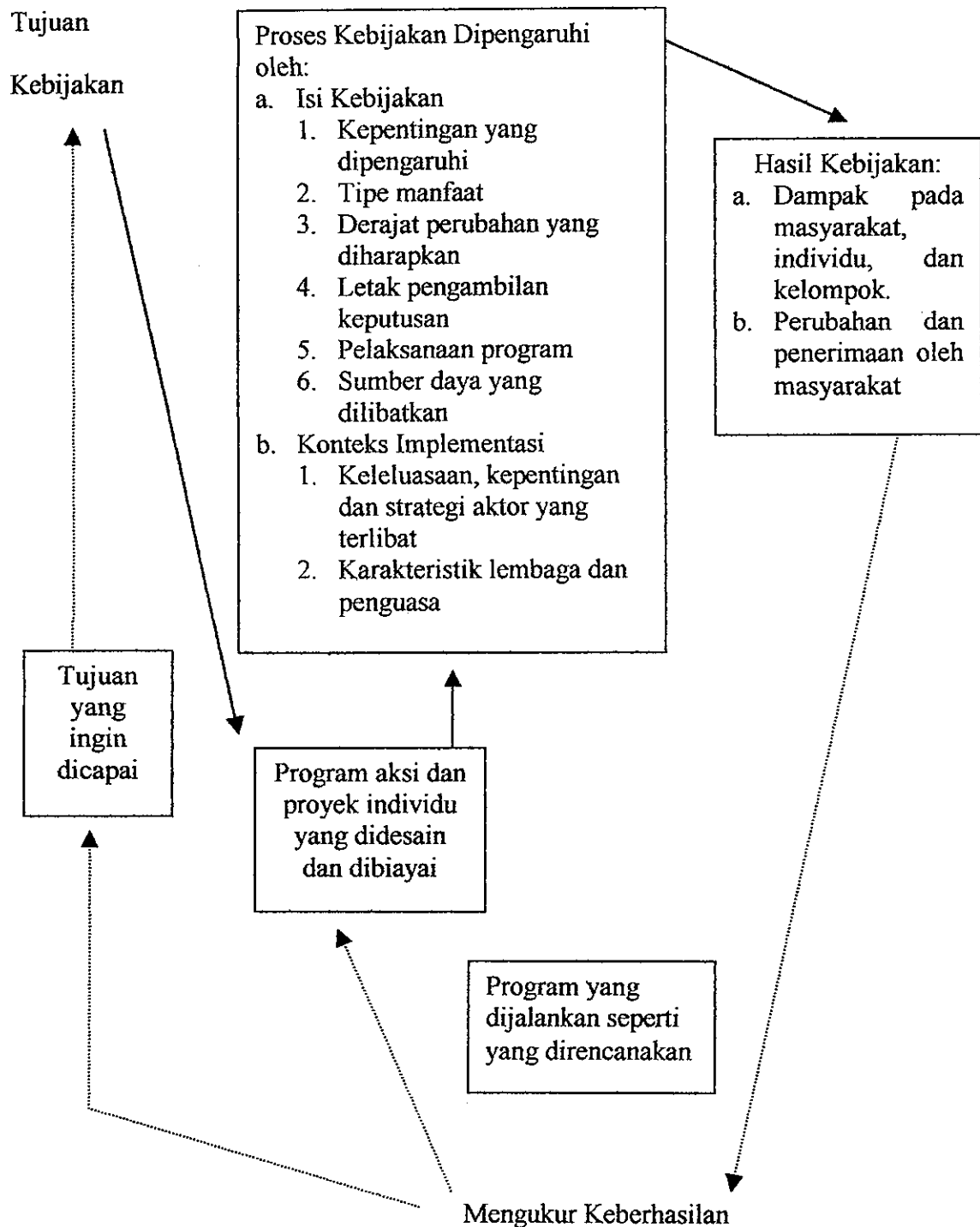
prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? Oleh karena itu, kedua ahli ini membuat tipologi kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Selanjutnya hubungan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu (1) ukuran dan tujuan kebijaksanaan, (2) sumber-sumber kebijaksanaan, (3) ciri-ciri atau sifat badan/ instansi pelaksanaan, (4) komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun model proses implementasi kebijaksanaan terlihat seperti berikut ini.

Gambar 1 Proses Implementasi Kebijakan
Van Mester dan Van Horn



Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994:22) implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan atau dalam studi implementasi akan melihat adanya dimensi atas suatu organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi tersebut dengan lingkungan. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Akan tetapi, hal ini tidak berjalan mulus, tergantung *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya sehingga apabila model Grindle itu digambarkan akan tampak sebagai berikut.

Gambar 2 Model Implementasi M.S. Grindle



Menurut Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dalam Wahab, 1997:81) bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan indentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementasi. Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain:

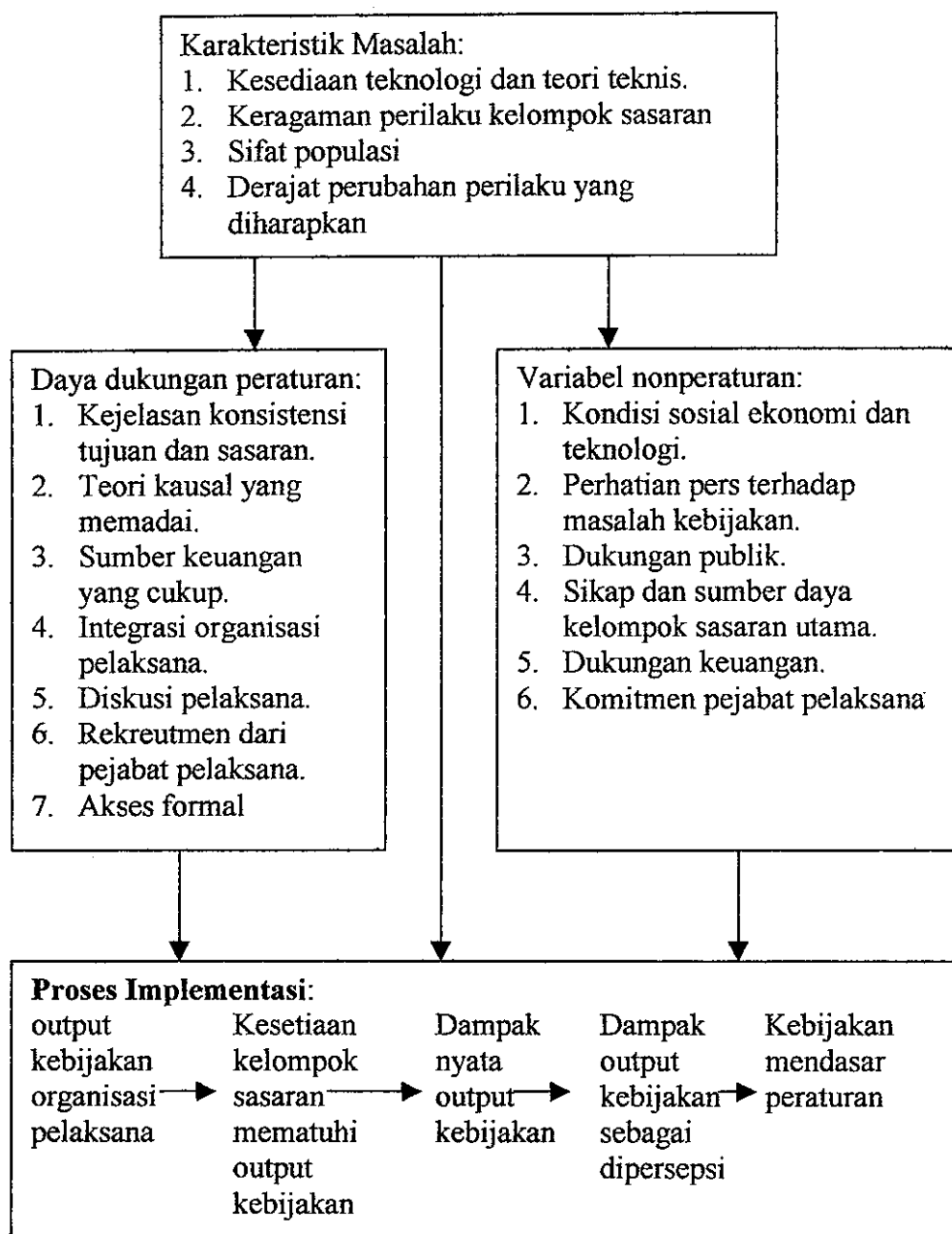
1. Kemudahan implementasi akan ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Struktur manajemen program yang mengoperasionalkan kebijakan, menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Faktor-faktor di luar peraturan, yaitu pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, implementasi akan lebih efektif bila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya.

Model implementasi kebijakan dari Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3 Model Implementasi

Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian

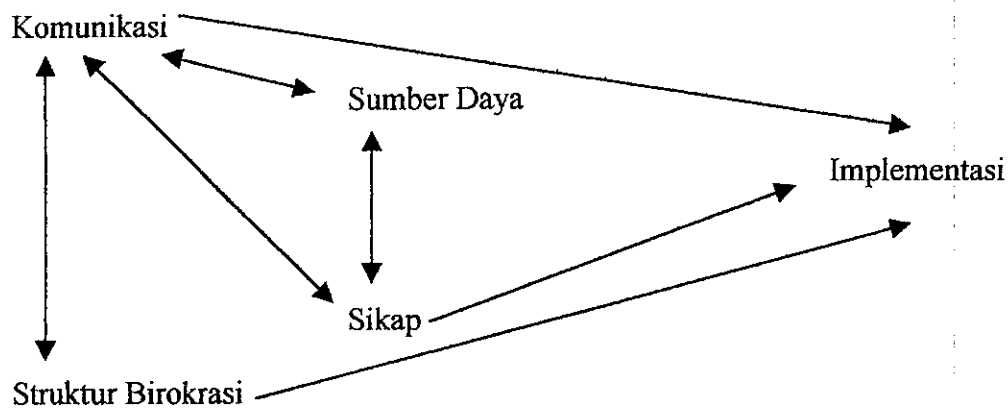


Senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya, menurut George C. Edward III (dalam Purnaweni, 1991:3) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi; merupakan proses menyalurkan informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.
2. Sumber-sumber daya (*resources*); dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
3. Sikap-sikap (*disposisi*); sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.
4. Struktur; dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Secara skematis, interaksi dari keempat faktor yang mempengaruhi gagal dan berhasilnya suatu implementasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 4 Model Implementasi Menurut George C. Edwards III



Dari berbagai teori yang telah disampaikan para ahli di atas maka peneliti memilih teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) sebagai landasan penelitian. Teori ini berasumsi bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap, (*disposisi*), sumber daya, dan struktur birokrasi.

Dalam hal ini penulis hanya akan mengadopsi dua variabel bebas dari teori implementasi Edward yang relevan dengan kondisi permasalahan di lapangan, yaitu sikap dan sumber daya. Selanjutnya, dalam pemecahan indikator (*breakdown indicator*) tentang implementasi nantinya akan diadakan modifikasi antara teori dari George C. Edward III dan para pakar lainnya dengan indikator implementasi dari Dinas Pendidikan selaku organisasi pelaksana program. Dengan demikian, hasil analisisnya diharapkan lebih memadai.

2. Hakikat Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Sesuai dengan Inpres No. 1 tahun 1994 program wajib belajar sembilan tahun merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum. Artinya, pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua warga negara, tanpa kecuali. Sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 11 ayat (2). "Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan".

Pendidikan dasar berlangsung sembilan tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat. Hal ini tidak berarti bahwa SD dan SLTP menjadi bentuk satuan pendidikan yang bersatu atau dalam satu atap, tetapi tetap terpisah, meskipun keduanya merupakan pendidikan dasar. Penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat (1) memberikan informasi mengenai gagasan bahwa pendidikan tidak identik dengan SD, tetapi SD dan SLTP. Dengan pengertian tersebut pendidikan dasar menunjuk kepada bentuk satuan pendidikan seperti dikemukakan dalam pasal 1 PP No. 28/1990 bahwa SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun, sedangkan SLTP adalah bentuk satuan pendidikan yang

menyelenggarakan program tiga tahun. Dengan adanya pendidikan dasar, SD dan SLTP tetap ada dan penyebutannya tindakan mengalami perubahan.

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Selain itu, pendidikan dasar diselenggarakan dengan memberikan pendidikan yang meliputi penumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan watak dan kepribadian, serta pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar juga berusaha memberikan kesanggupan kepada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar. Program pendidikan dasar dapat diberikan melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi dalam pendidikan dasar sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk (1) memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) membiasakan diri siswa untuk berperilaku baik, (3) memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, (4) memelihara kesehatan jasmani dan rokhani, (5) memberikan kemampuan untuk belajar, dan (6) membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri. Adapun pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat mencakup upaya untuk (1) memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat, (2) menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam lingkungan hidup, (3) memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang

diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat (Kep. Mendikbud No. 0306 TH 1995).

Konsep pendidikan dasar, menurut Ahmady (1994), berkaitan dengan makna persamaan dan keadilan dalam pendidikan. Persamaan dan keadilan merupakan salah satu yang dihadapi bangsa Indonesia, dan kedua masalah ini erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, persamaan berarti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang menurut UU RI No. 2/ 1989, tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Jadi, secara yuridis etis, perbedaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (paling tidak pada jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena latar belakang peserta didik harus sedapat mungkin dikurangi).

Di antara jenjang pendidikan, pendidikan dasar merupakan jenjang yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebab pada jenjang ini kemampuan dan keterampilan dasar dikembangkan pada peserta didik, baik sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan lanjutan pada pendidikan menengah maupun terjun ke masyarakat.

Menurut David Popenoe (1971:16) hakikat pendidikan itu sendiri memiliki empat fungsi, yaitu (1) transmisi kebudayaan masyarakat, (2) menolong individu memilih dan melakukan peran sosial, (3), menjamin integrasi sosial, (4) sebagai sumber inovasi sosial.

Wajib belajar pendidikan dasar berarti bahwa pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi semua peserta didik yang telah memenuhi persyaratan untuk

memasuki jenjang pendidikan dasar. Wajib belajar di Indonesia mempunyai beberapa ciri, yaitu (1) tidak bersifat paksaan, melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum dan yang lebih menonjol adalah aspek moral, yakni orang tua dan peserta didik merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan dasar karena berbagai kemudahan yang telah disediakan, (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar (Kep. Mendikbud No. 0306 TH 1995).

Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah merupakan suatu bentuk gerakan. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan yang ingin memperjuangkan kewajiban belajar. Adapun yang dimaksud kewajiban dalam hal ini merupakan arti didaktis, yaitu suatu kewajiban yang bersifat mendidik dan membimbing ke arah kebaikan dan kemajuan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa akan merasa memiliki tanggung jawab moral dalam menyukseskan program ini.

Lahirnya sebuah kebijaksanaan publik dilatarbelakangi adanya suatu masalah. Masalah yang dimaksud adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apa yang diharapkan suatu negara atau masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat itu. Demikian pula dengan lahirnya program wajib belajar sembilan tahun. Program ini dicanangkan karena dilatarbelakangi adanya suatu masalah yang ada di masyarakat. Yakni masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan banyaknya anak putus sekolah terutama di daerah pedesaan. Sementara itu, harapan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 adalah "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Oleh karena itu, banyaknya anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena letak geografis merupakan masalah yang besar,

demikian, pemerintah membuat sebuah kebijaksanaan publik yang berupa pencanangan sebuah program wajib belajar sembilan tahun yang ditujukan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Proses implementasi kebijaksanaan pemerintah tentang program wajib belajar sembilan tahun di Indonesia ternyata juga menjadi masalah tersendiri. Bagi daerah perkotaan atau daerah yang lebih maju barangkali tidak menjadi suatu persoalan yang berarti. Akan tetapi, di daerah pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah implementasi kebijaksanaan tersebut menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini sesuai dengan pendapat Charles O. Jones bahwa timbulnya suatu masalah karena adanya peristiwa-peristiwa yang dapat berpengaruh pada orang-orang secara berbeda-beda. Lebih lanjut ditekankan bahwa masalah tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus diatasi atau dipecahkan.

Masalah proses implementasi kebijaksanaan tentang program wajib belajar sembilan tahun di pedesaan sudah menjadi masalah yang umum (*public problem*) karena masalah tersebut mempunyai akibat yang luas yaitu menyangkut pemerataan pendidikan pada khususnya dan peningkatan sumber daya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah tetap akan mengatasi masalah tersebut sampai tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini terlihat dengan diundurnya batas berakhirnya program tersebut dari tahun 2004 menjadi tahun 2008. Charles O. Jones menekankan bahwa suatu masalah baru akan menjadi masalah-masalah kebijaksanaan bila masalah-masalah tersebut dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan suatu tindakan terhadap masalah-masalah itu. Karena proses implementasi program wajib belajar sembilan

tahun menjadi prioritas pemerintah untuk menuntaskannya maka masalah tersebut termasuk masalah kebijakan publik pemerintah Indonesia secara umum.

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Program jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Pola-pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain SD Reguler, SD Kecil, SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, SDLB, dan Kelompok Belajar Paket A. Sedang pola-pola untuk tingkat SLTP adalah SLTP Reguler, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, MTs Terbuka, Pondok Pesantren, SLTPLB, SLB, dan Kelompok Belajar Paket B.

Dari pola-pola tersebut, yang menjadi pola andalan adalah SLTP Reguler, SLTP Kecil, dan SLTP Terbuka. SLTP Reguler dan SLTP Kecil dikembangkan melalui pembangunan unit gedung baru (UGB) dan penambahan ruang kelas baru (RKB) yang selama Repelita VI dibangun sekitar 3.000 UGB dan 29.000 RKB. Untuk meningkatkan daya tampung, di daerah-daerah tertentu masih diterapkan sistem *double shift* (murid masuk pagi dan siang/sore hari). SLTP Terbuka dikembangkan untuk menampung siswa yang tidak dapat belajar secara reguler pada waktu tertentu. Pola ini lebih menekankan agar siswa belajar mandiri dan kelompok melalui buku modul dan bimbingan guru pamong dan guru bina. Pada tahun 1994/1995, jumlah SLTP Terbuka berjumlah 59 sekolah, dan pada tahun pelajaran 1998/1999 dikembangkan menjadi 3.700 sekolah (Puslit Diknas 1999).

Beberapa program pendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan selama ini meliputi: pendataan dan pemetaan sekolah, penyuluhan dan publikasi, pembentukan tim kordinasi di tingkat pusat dan daerah, pemberian penghargaan berupa Piagam Widyakrama bagi kabupaten/ kotamadya yang berhasil menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pemberian beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga miskin serta gerakan nasional orang tua asuh.

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun selama empat tahun pertama sejak dicanangkan menunjukkan hasil cukup memuaskan. Jumlah siswa pendidikan dasar pada tahun 1994 sebanyak 36,44 juta orang dengan rincian (1) siswa SD+MI berjumlah 29,46 juta orang, dan (2) siswa SLTP+MTs sebanyak 6,98 juta orang. Pada tahun 1997, jumlah siswa pendidikan dasar meningkat menjadi 39,01 juta orang dengan rincian (1) siswa SD+MI sebanyak 29,27 juta (turun 190 ribu siswa), dan (2) siswa SLTP+MTs sebanyak 9,73 juta orang (naik 2,75 juta orang). Krisis ekonomi memberikan dampak terhadap jumlah siswa pendidikan dasar. Pada tahun 1998, jumlah siswa pendidikan dasar berjumlah 38,63 juta orang, dengan rincian (1) siswa SD+MI berjumlah 29,10 juta orang dan (2) siswa SLTP+MTs berjumlah 9,54 juta orang (Puslit Diknas 2001).

Dilihat dari indikator angka partisipasi, kecenderungan keberhasilan wajib belajar menunjukkan pola yang sama dengan kecenderungan perkembangan jumlah siswa. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD meningkat dari 110% pada tahun 1994 menjadi 113,58% pada tahun 1997. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) meningkat dari 93% menjadi 94,96% dalam jangka waktu yang sama. Sedangkan untuk tingkat SLTP, APK meningkat dari 53% pada tahun 1994 menjadi 72,56% pada tahun

1997, dan APM meningkat dari 39,9% menjadi 55,92% dalam kurun waktu yang sama. Dampak krisis ekonomi terlihat berpengaruh terhadap APK dan APM pendidikan dasar. Pada tahun 1998, APK dan APM SD+MI masing-masing sebesar 113,74% dan 93,74%, dan untuk SLTP+MTs sebesar 71,92% dan 55,05% (Puslit Diknas 2001).

Indikator siswa putus sekolah menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun-tahun pertama pencaangan. Pada tahun 1994, jumlah angka putus sekolah SD mencapai 1,2 juta pertahun dan sekitar 454 ribu untuk SLTP. Pada tahun 1997, angka ini menurun menjadi 833 ribu untuk SD dan 365 ribu untuk SLTP. Sejak terjadinya krisis ekonomi jumlah angka putus sekolah membengkak menjadi 919 ribu untuk SD (meningkat 86 ribu siswa) dan 643 ribu untuk SLTP (meningkat sebesar 278 ribu siswa). Jumlah siswa putus sekolah di tingkat SD dan SLTP yang relatif besar ini merupakan masalah utama yang perlu mendapat pemikiran dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang akan datang (Puslit Diknas 2001).

Dilihat dari skala lokal, tingkat pencapaian angka partisipasi tiap propinsi bervariasi. Pada tahun 1994, hanya dua propinsi yang mencapai APK SLTP + MTs lebih dari 80% (tuntas pratama), yaitu DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Pada tahun 1997, jumlah propinsi yang mencapai batas minimal tuntas tersebut menjadi lima, yaitu DI Yogyakarta (116,54%), DKI Jakarta (102,61%), Bali (89,52%), Sumatera Barat (83,99%), dan Sumatera Utara (83,36%). Dilihat dari sisi yang lain, pada tahun yang sama, terdapat tujuh propinsi yang mempunyai APK wajib belajar 9 tahun di bawah 60%, yaitu; propinsi Kalimantan Barat (57,10%), Kalimantan Tengah (59,45%), Sulawesi Tengah (56,54%), Nusa Tenggara Barat (58,65%), Nusa Tenggara Timur (55,24%), Irian Jaya (52,34%), dan Timor Timur (41,20%) (Puslit Diknas 2001).

Pada tahun 1998, posisi tingkat pencapaian wajib belajar 9 tahun berdasarkan propinsi ini masih relatif sama. Namun hampir semua propinsi mengalami penurunan tingkat APK SLTP + MTs (maksimal 1,54%), kecuali 8 propinsi yang mengalami kenaikan APK tetapi sangat minimal, yaitu DI Yogyakarta, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, Irian Jaya dan Timor Timur. Terlepas dari angka prosentase siswa yang masuk sekolah (APK), terdapat tiga propinsi yang mempunyai angka penduduk absolut usia 13-15 tahun terbesar yang masih berada di luar sistem pendidikan dasar, yaitu Jawa Barat (1 juta orang), Jawa Timur (600 ribu orang) dan Jawa Tengah (525 ribu orang). Selanjutnya secara bertahap dengan intervensi program Jaring Pengaman Sosial (JPS), SPK SLTP + MTs dapat bertahan dan diproyeksikan sedikit naik, yaitu 72,30% (1999), 74,17% (2000), dan 76,05% (2001) (Puslit Diknas 2001).

Walaupun pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, khususnya pada empat tahun pertama sejak dicanangkan dapat dikatakan berhasil, namun terdapat sejumlah masalah, disamping masalah krisis ekonomi, yang harus mendapat perhatian di masa yang akan datang. Masalah-masalah tersebut meliputi :

- 1) Kurangnya daya tampung siswa SLTP, khususnya di daerah pedesaan, terpencil, pedalaman, dan perbatasan.
- 2) Tingginya angka putus sekolah tingkat SD (919 ribu tahun 1998) dan tingkat SLTP (643 ribu).
- 3) Rendahnya mutu pendidikan dasar yang diukur berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM) sebagai salah satu indikator mutu pendidikan.

- 4) Rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
- 5) Koordinasi wajib belajar khususnya di tingkat daerah (propinsi, kabupaten, dan kecamatan) belum berjalan dengan efektif

Berdasarkan kondisi dan masalah tersebut, maka kebijaksanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Wajib belajar 9 tahun merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan terlepas dari adanya krisis.
- 2) Target waktu pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang direncanakan tuntas tahun 2003/2004 perlu ditinjau kembali dan diusulkan menjadi tahun 2003 plus.
- 3) Pola pelaksanaan wajib belajar yang selama ini berjumlah 11 (SLTP Reguler, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Terpadu, SLTPLB, SLB, Madrasah Tsanawiyah (MTs), MTs Terbuka, Pondok Pesantren, Kejar Paket B, dan Ujian Persamaan) perlu dikaji ulang untuk menentukan pola-pola yang mana yang betul-betul efektif dalam menuntaskan wajib belajar.
- 4) Pelaksanaan wajib belajar harus ditangani secara lokal, karena itu koordinasi pelaksanaannya harus dilakukan di tingkat kabupaten melalui program desentralisasi.
- 5) Penuntasan wajib belajar tidak dapat dipisahkan dari program peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, peningkatan akses pendidikan dasar harus dilakukan bersama-sama dengan perbaikan mutu pendidikan dasar.

Untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sejumlah program esensial dan produktif perlu dilaksanakan, antara lain:

- 1) Melanjutkan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) bagi daerah yang membutuhkan, khususnya di daerah pedesaan. Dalam pembangunan USB, pemetaan sekolah (school mapping) hendaknya menjadi perhatian utama untuk menghindari penutupan sekolah swasta kelas menengah ke bawah. Pembangunan RKB hendaknya memperhatikan faktor yang sama dengan tetap memberi perhatian dan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan.
- 2) Memberdayakan dan meningkatkan mutu SLTP Terbuka yang telah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui konsolidasi dan perbaikan manajemen kelembagaan, peningkatan kualitas guru bina dan pamong, perbaikan mutu buku modul, perbaikan proses belajar mengajar, dan peningkatan dukungan dan kerjasama dengan masyarakat.
- 3) Melanjutkan pengadaan guru-guru kontrak untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah-daerah yang membutuhkan. Namun demikian pengadaan guru kontrak tetap difokuskan pada pemenuhan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan.
- 4) Melanjutkan pengadaan buku mata pelajaran yang berkualitas sehingga rasio buku dan murid mencapai 1:1 untuk setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, berbagai kegiatan pokok perlu diperhatikan antara lain perbaikan/revisi buku teks, pengadaan buku berdasarkan analisis kebutuhan atau permintaan sekolah, dan perbaikan jalur

distribusi buku sehingga sekolah mendapatkannya secara tepat jumlah dan tepat waktu.

- 5) Melanjutkan upaya peningkatan kualifikasi guru SLTP, sehingga secara berangsur-angsur mereka dapat mencapai tingkat pendidikan S1. Peningkatan kualifikasi ini dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi lokal yang memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan atau melalui program jarak jauh.
- 6) Meningkatkan bantuan bagi sekolah swasta yang mempunyai status akreditasi *diakui dan terdaftar* dalam pengadaan ruang kelas baru (RKB), buku dan alat pelajaran, dan tenaga kependidikan serta bantuan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar dalam rangka peningkatan kompetensi mengajar di sekolah.
- 7) Melanjutkan program jaring pengaman sosial di bidang pendidikan melalui program pemberian beasiswa bagi siswa SD dan SLTP yang kurang mampu, serta pemberian dana bantuan operasional (DBO) bagi sekolah-sekolah yang berada di kantong-kantong masyarakat miskin.
- 8) Melakukan konsolidasi dan rekonseptualisasi SLTP Terpadu dan SLTP Kecil, agar kedua lembaga pendidikan ini lebih dapat diberdayakan dan ditingkatkan kualitas pelayanan pendidikannya bagi warga masyarakat yang membutuhkan.
- 9) Memperhatikan secara lebih serius penanganan anak usia sekolah 7-15 tahun yang merupakan target-target khusus wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, seperti anak-anak yang berasal dari daerah terpencil, anak-anak daerah kumuh, anak-anak

jalan, dan kelompok anak-anak lain yang masih belum terjangkau pelayanan pendidikan dasar.

10) Meningkatkan koordinasi vertikal dan horisontal, khususnya antar unit terkait di daerah tingkat II dan di kecamatan.

11) Melibatkan partisipasi semua kekuatan, seperti pamong desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan kewanitaan, cendekiawan, dan usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan wajib belajar 9 tahun betul-betul merupakan gerakan sosial.

Disamping program-program reguler tersebut di atas, beberapa program inovatif perlu dikembangkan untuk membantu menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, antara lain :

- 1) Penyediaan insentif bagi kelompok masyarakat yang mau mendirikan lembaga pendidikan dasar melalui bantuan bangunan, bantuan guru, dan bantuan buku dan alat pelajaran.
- 2) Menjajaki kemungkinan pendirian unit sekolah baru (USB) di lingkungan pesantren diniyah (pesantren yang hanya menyelenggarakan sekolah keagamaan) berdasarkan kerjasama kemitraan. Sebagai misal, pesantren menyediakan tanah untuk dibangun dan menangani program ekstrakurikuler, sedangkan pemerintah menyediakan bangunan sekolah, tenaga guru, buku dan alat pelajaran, serta biaya operasional.
- 3) Pembukaan kelas-kelas jauh, khusus untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau.

2. Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak

Sistem nilai budaya merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan suatu masyarakat karena sistem nilai budaya banyak berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku warga dalam rangka menanggapi situasi sekitarnya. Tentang sistem nilai budaya Koentjoroningrat (1984:56) berpendapat bahwa suatu sistem nilai budaya ialah konsepsi-konsepsi yang hidup di alam pikiran sebagian warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai di dalam hidup. Berdasarkan pendapat tersebut, suatu sistem nilai budaya juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang memberikan patokan tentang hal-hal yang baik atau buruk, benar atau salah, dan mengenai apa yang dianggap penting dan tidak berharga dalam hidup.

Nilai budaya yang berlaku di masyarakat atau yang dianut seorang anggota masyarakat akan berpengaruh terhadap pendidikan, terutama dalam memandang nilai anak. Nilai yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang dianggap baik dan diyakininya. Nilai juga dipandang sebagai kaidah hidup seseorang sehingga sesuatu yang dianggap akan selalu dihargai, dipelihara, dan diagungkan untuk mengambil keputusan. Nilai yang merupakan kaidah hidup seseorang akan tercermin melalui pola pikir, aspirasi, persepsi, dan bertindak (Kaswardi, 1998:7)..

Di dalam pembicaraan masalah nilai anak, kita akan dihadapkan pada masalah yang sangat luas karena beragamnya argumentasi, generalisasi, perhitungan, dan pengecualian yang dijumpai dalam persoalan makna nilai anak. Nilai anak dapat didekati dengan berbagai sudut pandang si pemakna, misalnya saja (Hull (1977:12) membedakan nilai anak menjadi lima konsep dasar, yaitu (1) harga anak yang banyak berhubungan dengan masalah kepuasan orang tua, (2) biaya anak yang dikeluarkan

untuk membesarkan anak, (3) penghasilan yang berhubungan dengan sumber-sumber kesejahteraan anak, dan (4) keuntungan dari seorang anak yang berhubungan dengan hasil yang didupatkannya.

Harga anak yang banyak berhubungan dengan masalah kepuasan orang tua artinya orang tua yang telah memiliki anak merupakan suatu bentuk kesempurnaan hidup yang akan maelangsungkan kelestarian generasinya. Orang tua akan merasa puas apabila telah berkeluarga dan cepat dikaruniai anak. Demikian pula setelah anak itu besar, orang tua akan merasa puas apabila anak tersebut menjadi anak yang rajin dan penurut dalam arti rajin membantu orang tua dalam bekerja. Orang tua pun akan menjadi puas apabila setelah anaknya berkeluarga dia mampu memberikan warisan yang cukup kepada anaknya.

Nilai yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membesarkan anak maksudnya adalah berapa besar biaya yang harus ditanggung orang tua semenjak lahir hingga dia mampu mencari nafkah sendiri. Oleh karena itu, setelah anak bersekolah akan juga dihitung besarnya biaya yang dikeluarkan dan bagaimana hasilnya nanti setelah lulus apakah untung atau rugi setelah lulus nanti dalam arti penghasilan yang diperolehnya dibandingkan dengan biaya sekolah yang telah dikeluarkan.

Anak yang mampu memberikan kontribusi penghasilan kepada keluarga atau orang tua dianggap anak yang berhasil atau memiliki nilai positif. Oleh karena itu, nilai anak akan ditentukan mampu tidaknya anak menambah penghasilan keluarga atau memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tua setelah berkeluarga.

Keuntungan dari seorang anak yang berhubungan dengan hasil yang didupatkannya maksudnya anak merupakan suatu aset untuk menambah penghasilan.

Setelah anak-anak tersebut dianggap dapat bekerja dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk bekerja atau membantu orang tua dalam meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, keberadaan anak akan memberikan keuntungan yang berarti setelah mampu memberikan kontribusi kepada keluarga.

Konsep yang disampaikan Hull (1977:14) tersebut ditinjau dari sudut pandang ekonomi sehingga nilai seorang anak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi sehingga nilai anak hanya dilihat dari hasil, keuntungan bersih yang tersisa setelah dikurangi ongkos pemeliharaan anak.

Konsep lain berdasarkan pendekatan psikososial dengan latar belakang pendekatan fungsional (*functions and disfunction*). Nilai anak dapat dibagi menjadi (1) nilai positif, meliputi fungsi nilai kepuasan, kebaikan, dan keuntungan, (2) nilai negatif, yang meliputi gangguan *disvalues*, (ongkos), beban, kesulitan, dan kerugian (Simon, 1977:35).

Ada pula yang mengajukan konsep nilai anak yang dilihat dari sisi arti hubungan orang tua dan anak, tetapi semuanya itu sama-sama mengundang aspek nilai positif yang berarti menghadirkan keuntungan dan nilai negatif yang berarti menghadirkan kerugian.

Dalam kehidupan di pedesaan, sebagai nilai positif anak, anak memegang peranan penting dalam membantu memutar roda ekonomi rumah tangga yang orang tuanya yang berupa bantuan kerja. Adapun bantuan kerja yang dapat dimanfaatkan apabila dilihat dari jenis pekerjaan rumah tangga saja untuk setiap hari., menurut penelitian Soegito (1976), rata-rata anak laki-laki menyumbang sebesar 0,29 jam dan sumbangan anak perempuan sebanyak 0,24 jam. Namun, di luar jenis pekerjaan rumah

tangga terkadang ada yang memanfaatkan anak bekerja untuk memperoleh hasil atau upah. Adanya kecenderungan mepekerjakan anak berarti mengorbankan kesempatan pengembangan pendidikan anak. P-3PX UGM mengungkapkan, sesuai dengan hasil penelitiannya di NTT, bahwa masalah pendidikan terbentur pada kenyataan bahwa anak harus bekerja sehingga menomorduakan sekolah.

Di sisi lain dalam konteks budaya kita anak merupakan tabungan masa depan orang tua. Bila orang tua berhasil menyekolahkan anak lebih tinggi dan hidupnya akan sejahtera, akan berdampak pula pada kehidupannya di masa mendatang bahkan akan merambah pula pada handai taulannya. Hal seperti itu ditegaskan oleh Singarimbun (1977:28) sebagai berikut.

“Nilai positif anak yang paling sering diungkapkan oleh responden adalah bantuan ekonomis dalam bentuk kerja (baik di rumah, dalam pekerjaan orang tua atau pertanian) dan juga jaminan di hari tua, sedangkan nilai negatif yang paling menonjol adalah beban ekonomi termasuk uang sekolah.”

Dengan demikian, nilai positif anak adalah manfaat anak bagi orang tua atau keluarga, sedang nilai negatif anak adalah beban atau biaya yang harus ditanggung oleh orang tua atau keluarga untuk memelihara dan membesarkan anak, yang meliputi biaya hidup dan biaya sekolah anak.

Kartoyo (1983:46) menegaskan adanya ongkos-ongkos yang langsung dikeluarkan oleh orang tua guna membesarkan anak tersebut, misalnya untuk keperluan sandang, papan, pendidikan, dan lain-lain akan merupakan aspek kerugian (*disutility*) bagi orang tua. Dalam hubungan ini Hull (1977:14) membedakan antara harga dan ongkos anak. Harga anak adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk anak guna membiayai kehidupannya. Ongkos anak adalah jumlah uang yang

benar-benar dikeluarkan untuk biaya anak. Jadi, harga anak itu merupakan konsep yang sebaiknya dilakukan, adapun ongkos anak merupakan kenyataan.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang dapat dipandang sebagai manfaat yang dapat diperoleh orang tua dari anak, yaitu anak sebagai faktor konsumsi, produksi, dan tabungan (Kartoyo, 1983:46). Manfaat konsumtif bagi orang tua, yaitu sebagai pencurahan kasih sayang, kebanggan, dan sumber kepuasan orang tua. Suksesnya seorang anak akan dapat memberikan kepuasan kepada orang tua yang bersangkutan. Manfaat produktif untuk membantu pekerjaan orang tua atau membantu mendatangkan penghasilan bagi orang tua, sedang manfaat sebagai tabungan yaitu kegunaan untuk menjamin hari tua orang tuanya.

Sehubungan dengan beragamnya nilai anak yang disampaikan di atas sebenarnya tiap nilai memiliki ukuran dan bobot yang berbeda-beda. Menurut Scheler seperti yang dikutip oleh Kaswardi (1998:37) pada hakikatnya nilai memiliki hierarki atau tingkatan sebagai berikut.

- 1) Nilai-nilai kenikmatan, artinya nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atau yang menyebabkan orang senang atau menderita.
- 2) Nilai-nilai kehidupan, nilai yang berhubungan dengan yang terpenting dalam kehidupan, termasuk nilai kesejahteraan.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan, artinya nilai-nilai yang bersumber pada kebenaran filsafat. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran menurut masyarakat yang berpedoman pada pengetahuan filsafatis.

- 4) Nilai-nilai kerokhanian, artinya nilai yang berhubungan dengan modalitas yang suci dan tak suci yang bersumber dari Tuhan.

Berdasarkan uraian di atas konsep nilai anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga/keberadaan anak menurut pandangan orang tuanya. Apakah keberadaan anak hanya dilihat dari nilai positif (kepuasan, kebaikan, dan keuntungan), nilai negatif (gangguan, ongkos, beban kesulitan, dan kerugian) atau kedua-duanya.

3. Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penghayatan (Walgito, 1994:8). Tak jauh dari pengertian tersebut, Young (1995:59) memberikan pengertian bahwa persepsi berkenaan dengan aktivitas pancaindra, penafsiran, dan pemahaman objek, baik fisik maupun sosial. Demikian pula menurut Sudarmo dan Sudito (2000:16), bahwa persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus

Berdasarkan pengertian di atas pada prinsipnya persepsi adalah proses mengetahui dan memahami sesuatu dengan menggunakan alat indra. Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama, yaitu (1) seleksi terhadap stimulus yang datang dari luar, (2) interpretasi, yaitu proses pengorganisasian informasi, dan (3) reaksi, yaitu bentuk tingkah laku akibat interpretasi.

Persepsi dipengaruhi oleh kerja sama faktor luar (stimulus) dan faktor dalam (personal). Faktor luar meliputi hal-hal yang berasal dari luar individu, seperti

pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, dan lain-lain. Faktor dalam adalah semua yang berasal dari dalam individu, seperti cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Oleh karena itu, sesuai pendapat Soedarmo (1996:7) bahwa persepsi dapat berubah karena pengaruh pengalaman, teman, lingkungan, dan sebagainya. Demikian pula menurut Tjiptono dan Anastasia (2000:16) bahwa persepsi merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan yang memiliki harapan.

Dari beberapa pengertian mengenai persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempersepsi individu mula-mula akan mengadakan pengamatan, kemudian mengadakan seleksi dari apa yang diamati. Setelah itu, baru mengadakan penafsiran dan kemudian baru mereaksi dalam bentuk tingkah laku. Dalam menyadarkan reaksi itu, seseorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam dirinya dan juga yang ada di luar dirinya. Faktor luar tersebut di antaranya lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Persepsi orang tua terhadap pendidikan akan mempengaruhi aspirasi. Artinya, kemampuan orang tua dalam melihat pentingnya pendidikan akan berpengaruh pada harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud aspirasi di sini adalah keinginan, harapan, atau cita-cita orang tua terhadap tingkat pencapaian pendidikan anak-anaknya.

Persepsi orang tua dengan melihat keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebelumnya, baik yang dialami oleh dirinya sendiri maupun yang dialami orang lain akhirnya dijadikan cermin pengalaman bagi dirinya. Pengalaman seseorang yang dirasakan sebagai kesuksesan akan meningkatkan aspirasinya dan di sinilah orang tua akan memiliki persepsi bahwa pendidikan memiliki manfaat yang penting. Namun, jika

pengalaman seseorang yang dirasa sebagai kegagalan aspirasinya akan turus drastis, bahkan orang tua akan memiliki persepsi bahwa pendidikan tak begitu bermanfaat.

Persepsi orang tua terhadap pendidikan anak dapat diamati dari cara orang tua itu menilai arti penting belajar bagi anak-anaknya dan dapat pula dilihat dari cara memahami nilai fungsional pendidikan bagi kehidupan masa depan anak-anaknya. Persepsi orang tua terhadap fungsi sekolah ialah anggapan atau pendapat orang tua sebagai hasil pengamatan sehari-hari tentang sekolah.

Persepsi orang tua terhadap pendidikan anak merupakan suatu konsep pikir orang tua mengenai makna dan arti penting proses pendidikan anak-anak mereka selepas pendidikan SD; kaitannya dengan relevansi pendidikan serta biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Jika persepsi orang tua terhadap pendidikan baik akan menopang munculnya aspirasi yang tinggi maka kesadaran untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi akan besar juga.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan akan menentukan tinggi rendahnya tingkat aspirasi orang tua. Di samping itu, keputusan orang tua untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikan anak akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya laju siswa yang tidak melanjutkan dan siswa yang putus sekolah.

Persoalan lain yang menjadi penyebab adanya putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang SLTP adalah masalah klasik, yaitu persepsi orang tua di pedesaan yang menganggap bahwa pendidikan untuk anak wanita kurang begitu penting. Hal ini didasari adanya anggapan bahwa yang bertanggung jawab kelak setelah berumah tangga adalah pihak laki-laki sehingga pihak perempuan hanya membantu.

Dengan demikian, tidak mengherankan kalau ada anak wanita di pedesaan yang masih banyak ditemukan sebelum lulus SLTP telah dinikahkannya.

Bertolak dari uraian tersebut konsep persepsi orang tua tentang pendidikan adalah suatu pandangan orang tua dalam melihat konsep pendidikan. Artinya kemampuan orang tua dalam melihat visi dan manfaat pendidikan bagi anaknya.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi kemampuan sosial ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Kemampuan ini ditunjukkan oleh latar belakang status sosial ekonomi orang tua.

Status sosial ekonomi yaitu kedudukan tertentu seseorang terhadap lainnya dalam suatu kelompok atau kelas masyarakat. Syarat menjadi anggota kelas masyarakat ialah menjalankan beberapa aktivitas ekonomi, bentuk dan jumlah pendidikan resmi, jumlah penghasilan, bentuk perumahan, dan lain-lain.

Permasalahan status sosial ekonomi yang dihadapi oleh orang tua di daerah pedesaan tampaknya masih merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks yang pemecahannya banyak bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. Dunia pedesaan menurut Malassis (1981:105) masih ditandai dengan kemiskinan dalam bidang kebendaan, rendahnya pendapatan keluarga, rendahnya tingkatan penanaman modal umum (seperti air dan listrik), dan persediaan keperluan hidup yang terbatas.

Status sosial keluarga (orang tua) yang rendah menyebabkan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan fasilitas belajar yang memadai pada anak-anaknya.

Perceraian yang terjadi dalam suatu keluarga dapat menimbulkan kasus anak berorang tua tunggal. Dampak negatifnya anak ikut salah satu ibu atau bapak, ikut nenek atau keluarga lain atau anak mempunyai ibu tiri.

Pendidikan rendah yang disandang orang tua menyebabkan tidak mempunya orang tua membantu anak apabila menghadapi kesulitan dalam pelajaran di sekolah. Keadaan semacam itu sering kali menyebabkan anak mengalami ketegangan atau stres yang akhirnya dapat menimbulkan gangguan belajar. Gangguan belajar yang berkepanjangan akhirnya menyebabkan anak menjadi malas sekolah, bahkan akan putus sekolah.

Permasalahan keadaan sosial-ekonomi ini tampaknya, di samping permasalahan aspirasi dan persepsi pendidikan orang tua, juga dapat mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak. Seperti dikatakan Laurie dan Reif, yang dikutip Sidharto (1989:15), kemiskinan, yaitu taraf orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan dasar. Masalahnya, orang tua diharapkan pada kekurangmampuan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Kondisi sosial ekonomi yang lemah menyebabkan lemah pula kemampuan untuk menyekolahkan anak, apalagi untuk sekolah lanjutan yang berada di kota yang jauh dari tempat tinggal dan memerlukan biaya angkutan dan biaya lainnya yang tinggi. Mengenai hal tersebut di atas, Kammas (1989:30) menyatakan bahwa

“...kelemahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan sekolah ialah masih terdapat sumbangan orang tua untuk keperluan tertentu, seperti biaya mencetak Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dalam keperluan lainnya. Juga persediaan buku-buku untuk semua mata pelajaran tidak selalu cukup terpaksa membeli sendiri atau tidak memiliki buku itu karena keadaan ekonomi orang tuanya”

Dengan demikian, masalah kesulitan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan yang tinggi dapat menyebabkan turunnya kuantitas peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, menurut Ali (1991:21) masalah ekonomi sering kali menimbulkan masalah sosial, seperti ketidakstabilan keluarga. Anak-anak mereka berkembang dalam budaya kemiskinan dan bahkan banyak di antaranya yang hidup tanpa harapan serta bersikap acuh tak acuh.

Di daerah pedesaan selain sarana pendidikan masih kurang, keadaan ekonomi masyarakat juga masih rendah. Hal ini dinyatakan oleh Gaffar (1990:19), bahwa penduduk pedesaan kebanyakan hidup sebagai petani, nelayan, termasuk dalam kategori berpenghasilan rendah. Lebih lanjut Mubyarto (1992:13) menyatakan bahwa karena orang tua berpenghasilan rendah, anak-anak mereka yang berada pada usia muda sekalipun didorong untuk turut meringankan beban hidup orang tua dengan jalan turut ambil bagian dalam upaya pertanian.

Broadly seperti yang dikutip Mendelievich (1988:115), menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan berbanding terbalik dengan derajat kemajuan ekonomi. Eksploitasi tenaga kerja anak merupakan suatu akibat dari situasi keterbelakangan yang kompleks. Oleh karena itu, keadaan penduduk pedesaan pada umumnya lamban perkembangan-derajat-kemajuan ekonomi rumah tangganya (sebagai akibat rendahnya produktivitas dan pendapatan), merupakan faktor pendorong utama bagi pengikutsertaan anak dalam berbagai kegiatan ekonomi rumah tangga. Adanya kenyataan bahwa lebih banyak remaja berusia 13-18 tahun yang putus sekolah daripada usia-usia sebelumnya disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa usia tersebut anak

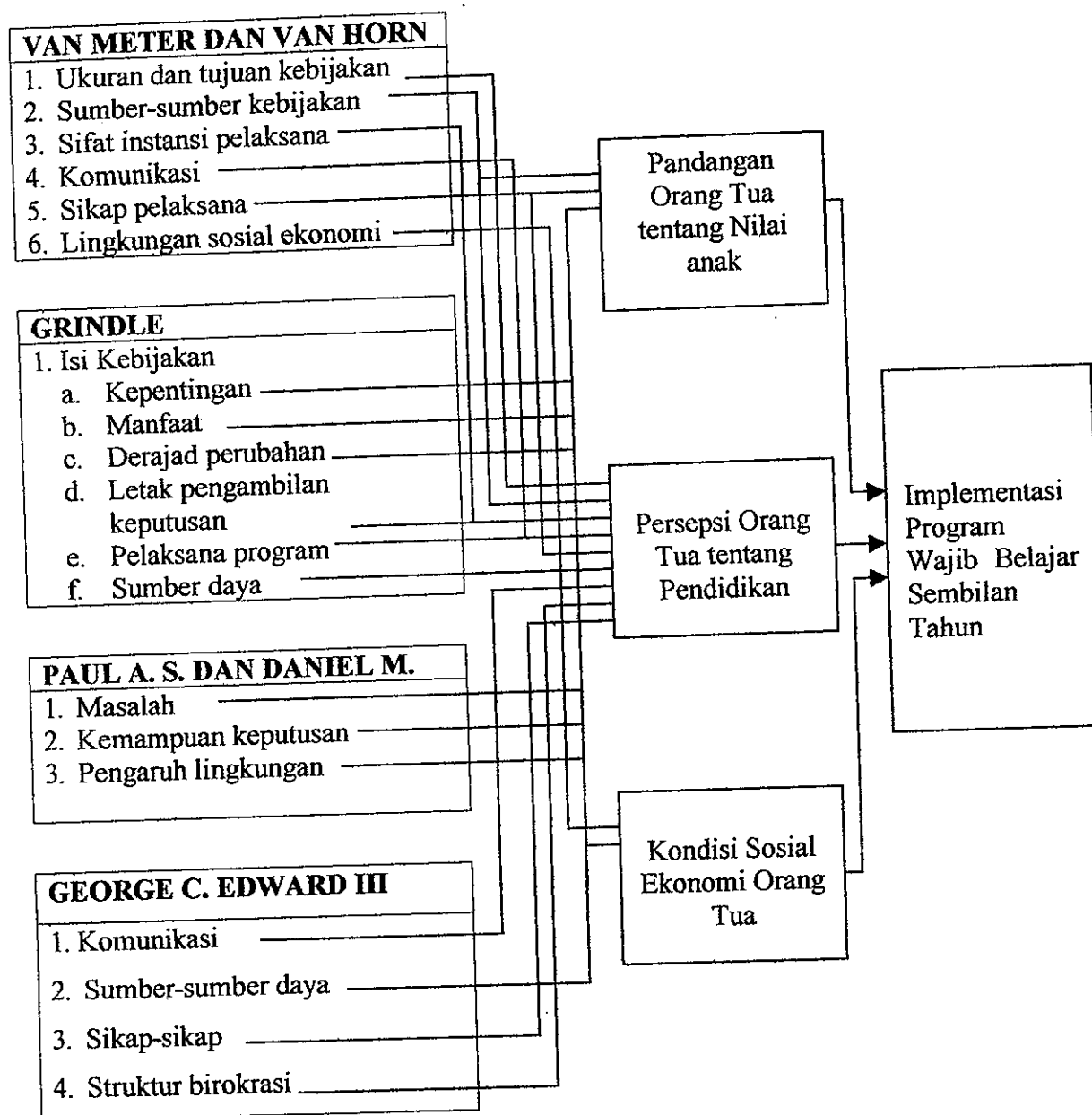
sudah dapat dibutuhkan tenaganya untuk membantu orang tuanya mencari nafkah hidup.

Kenyataan lain yang menunjukkan adanya peluang keikutsertaan dalam kegiatan perekonomian di perkotaan terkadang juga dapat mendorong anak memutuskan bahwa lebih baik memasuki pasaran kerja daripada melanjutkan sekolah. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan effendi (1992:87), bahwa anak-anak yang memasuki pasaran kerja tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Kalau tak ada kebijakan yang seksama, tidak tertutup kemungkinan tahun-tahun mendatang jumlah anak yang turut aktif dalam kegiatan ekonomi meningkat.

Di pedesaan, menurut Effendi (1992:87), keterlibatan anak laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar bila dibanding dengan perempuan. Proporsinya sekitar 57% dan 36%. Karena merasa sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri melalui kegiatan ekonominya, anak merasa enggan untuk sekolah.

Berpijak dari paparan tersebut yang dimaksud dengan konsep kondisi sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan orang tua atau kelas orang tua dalam kehidupan bermasyarakat serta dilihat dari pendapatan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Program wajib Belajar Sembilan Tahun
di Desa Kedungwarukidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak



B. Hubungan Konsep antarvariabel

1. Hubungan antara variabel pandangan orang tua tentang nilai anak dengan program wajib belajar sembilan tahun (X1 dengan Y)

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun bukan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan orang tua. Tanggung jawab orang tua dalam menyukseskan program tersebut terlihat pada partisipasinya. Partisipasi tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan orang tua tentang nilai anak. Sehubungan dengan nilai anak Simon (1977:35) memberikan ancangan bahwa nilai anak dapat dibagi menjadi (1) nilai positif, meliputi kepuasan kebaikan, dan keuntungan; (2) nilai negatif, meliputi gangguan (*divalues*), ongkos, beban, kesulitan, dan kerugian. Pandangan tersebut jelas memiliki hubungan terhadap kesuksesan program wajib belajar sembilan tahun. Orang tua yang hanya berorientasi pada nilai positif berarti keberadaan anak hanya dihitung dari segi keuntungan yang akan diperolehnya, namun orang tua tidak mau memikirkan tentang ongkos yang dikeluarkan untuk pendidikannya. Jika orang tua memiliki pandangan yang demikian akan berdampak pada rendahnya partisipasinya dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

2. Hubungan antara variabel persepsi pendidikan dengan program wajib belajar sembilan tahun (X2 dengan Y)

Menurut Sudito (2000:16) bahwa persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus. Persepsi dipengaruhi oleh kerja sama dengan faktor luar (stimulus) dan faktor dalam

(personal). Faktor luar meliputi hal-hal yang berasal dari luar individu, seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, dan lain-lain. Faktor dalam adalah semua yang berasal dari dalam individu, seperti cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.

Persepsi orang tua terhadap pendidikan merupakan suatu konsep pikir orang tua mengenai makna dan arti penting proses pendidikan anak-anak mereka selepas pendidikan SD, kaitannya dengan relevansi pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Jika persepsi orang tua terhadap pendidikan baik, akan menopang munculnya aspirasi yang tinggi sehingga kesadaran untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi akan besar pula. Dengan demikian, persepsi orang tua tentang pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

3. Hubungan antara variabel kondisi sosial ekonomi orang tua dengan program wajib belajar sembilan tahun (X3 dengan Y)

Mallassis (1981:105) berpendapat bahwa kondisi ekonomi meliputi kemilikan kebendaan, pendapatan, penanaman modal, dan persediaan hidup, sedang status sosial meliputi keharmonisan rumah tangga, dan pendidikan orang tua. Kondisi sosial ekonomi tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan sikap orang tua terhadap pendidikan anak. Orang tua yang memiliki ekonomi lemah pola pikir dan sikapnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan pendidikan anak bukan menjadi prioritas utama. Bagaimana mungkin mereka menyekolahkan anaknya sementara kesulitan hidup yang dihadapi selalu melilitnya. Demikian pula dengan kondisi sosial orang tua, status sosial dan pendidikan orang tua yang rendah

akan memandang bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Pandangan yang terpenting baginya adalah bahwa hidup seseorang yang paling esensial adalah mampu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Di samping itu, pendidikan tidak menjanjikan pekerjaan dan kekayaan. Keharmonisan dalam rumah tangga juga mempengaruhi kondisi belajar anak. Anak akan merasa terganggu belajarnya jika keharmonisan keluarga berantakan. Jadi, kondisi sosial ekonomi merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh terhadap kesuksesan program wajib belajar sembilan tahun.

4. Hubungan antara variabel pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi orang tua terhadap pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi dengan program wajib belajar sembilan tahun (X1, X2, X3 dengan Y)

Pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi orang tua terhadap pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi merupakan variabel prediktor. Artinya, ketiga variabel tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun. Ketiga variabel tersebut juga saling berhubungan dan menentukan variabel lainnya. Misalnya, pandangan orang tua tentang nilai anak akan berhubungan dengan persepsi pendidikan dan kondisi sosial ekonomi, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka di atas hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

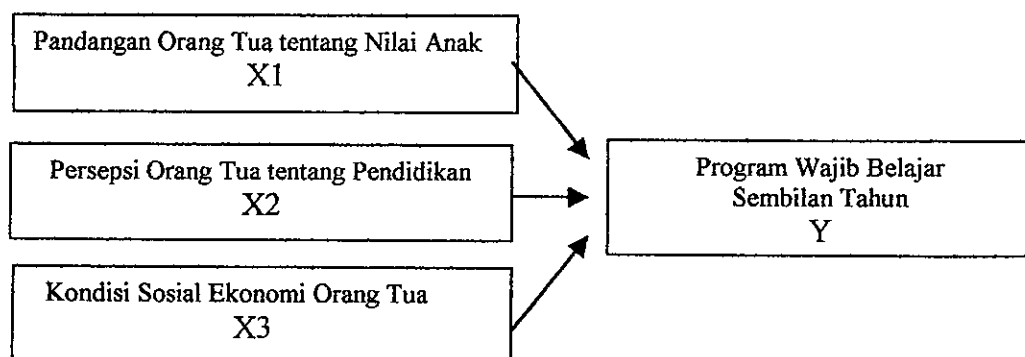
1. Ha : Ada hubungan antara pandangan orang tua tentang nilai anak dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.
2. Ha : Ada hubungan antara persepsi orang tua tentang pendidikan dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.
3. Ha : Ada hubungan antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.
4. Ha : Ada hubungan antara pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.

Model Geometris

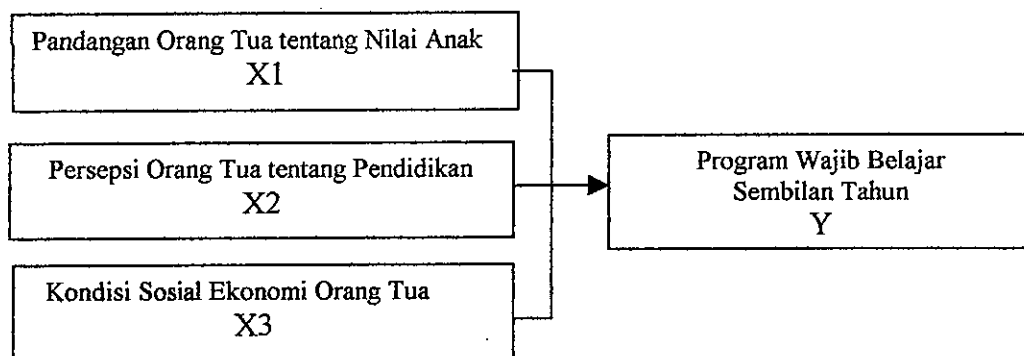
Gambar 5

Model Hipotesis Geometris

1. Hipotesis Minor



2. Hipotesis Mayor



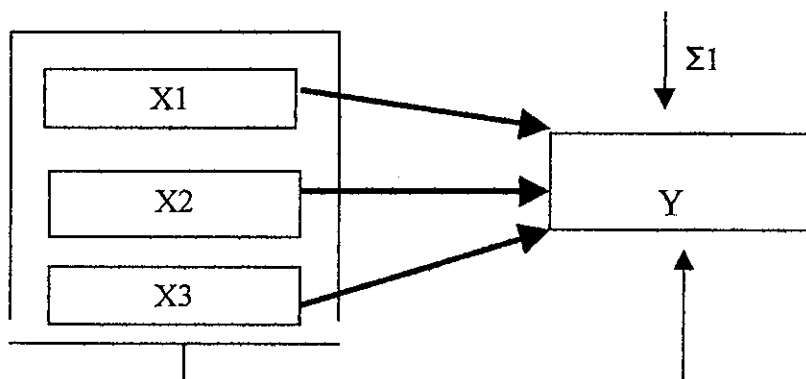
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini akan mencari keberartian hubungan pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Karena penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, data-data yang terkumpul akan penulis kuantifikasikan dalam bentuk angka-angka sebagai bahan untuk mereduksi atau menyimpulkan hasil penelitian. Adapun metode pengumpulan datanya yang penulis gunakan adalah metode survai. Survai yang penulis lakukan yaitu dengan melihat data di lapangan tentang jumlah anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTP serta berbagai faktor penyebabnya.

Adapun rancangan penelitian yang memperlihatkan hubungan antarvariabel adalah sebagai berikut.



KETERANGAN

X 1	= Pandangan orang tua tentang nilai anak
X 2	= Persepsi orang tua tentang pendidikan
X 3	= Kondisi sosial ekonomi orang tua
Y	= Program wajib belajar sembilan tahun
Σ 1	= Faktor-faktor lain yang tidak diteliti

B. Fokus penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui realisasi kebijakan pemerintah, terutama program wajib belajar sembilan tahun. Karena analisis pelaksanaan program tersebut melibatkan banyak faktor, peneliti dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi terhadap program wajib belajar sembilan tahun.

Penulis memfokuskan pada hal-hal tersebut karena sambutan orang tua dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun belum sepenuhnya optimal. Kekurangoptimalan tersebut tidak lain karena masih terbelakangnya pandangan orang tua tentang nilai anak dan persepsi pendidikan. Demikian pula dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang memungkinkan, terutama di alam pedesaan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kedung Warukidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.

D. Variabel Penelitian

1. Definisi Konseptual

Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini meliputi pandangan orang tua tentang nilai anak (X1), persepsi pendidikan (X2), dan kondisi sosial ekonomi (X3); sedangkan variabel terikatnya program wajib belajar sembilan tahun (Y). Adapun definisi konseptual variabel tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Program wajib belajar sembilan tahun adalah program yang dicanangkan pemerintah dengan mewajibkan kepada seluruh warga negara untuk menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, yaitu enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP.
- b. Nilai anak adalah harga/keberadaan anak menurut pandangan orang tuanya. Apakah keberadaan anak hanya dilihat dari nilai positif (kepuasan, kebaikan, dan keuntungan), nilai negatif (gangguan, ongkos, beban kesulitan, dan kerugian) atau kedua-duanya.
- c. Persepsi orang tua tentang pendidikan adalah suatu pandangan orang tua dalam melihat konsep pendidikan. Artinya kemampuan orang tua dalam melihat visi dan manfaat pendidikan bagi anaknya.
- d. Kondisi sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan orang tua atau kelas orang tua dalam kehidupan bermasyarakat serta dilihat dari pendapatan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

2. Definisi Operasional

- a. Implementasi program wajib belajar sembilan tahun selain terlihat dalam angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) juga terlihat dengan indikator-indikator berikut ini.
 - 1) Tingkat pendidikan anak
 - 2) Dukungan dan partisipasi orang tua terhadap program wajib belajar sembilan tahun
- b. Pandangan Orang Tua terhadap Nilai Anak terlihat dengan indikator berikut ini.
 - 1) Orang tua akan merasa puas apabila anak dapat membantu orang tua dalam bekerja.
 - 2) Orang tua selalu memperhitungkan untung ruginya setelah menyekolahkan anaknya.
 - 3) Orang tua mengharapkan anaknya memberikan kontribusi dalam menambah penghasilan keluarga, yakni dengan bekerja.
- c. Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan terlihat dengan indikator.
 - 1) Pendidikan bagi anak wanita tidak begitu penting.
 - 2) Pendidikan tidak menjanjikan masa depan.
 - 3) Masih banyaknya lulusan, bahkan sarjana yang masih menganggur.
 - 4) Dengan bersekolah biasanya anak akan malas bekerja untuk membantu orang tua.
 - 5) Asal anak sudah bisa membaca dan menulis sudah cukup dan tak perlu melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

d. Kondisi Sosial dan Ekonomi Orang tua

- 1) Pendapatan orang tua.
- 2) Penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Miskinnya akan hal-hal kebendaan.
- 4) Kondisi rumah tangga kurang harmonis.
- 5) Pendidikan orang tua yang rendah.
- 6) Tempat tinggal yang masih terpencil dan jauh dari jangkauan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data penelitian ini berupa jawaban narasumber yang dikuantifikasikan dalam bentuk angka-angka. Di samping itu, juga berupa keterangan-keterangan yang terdapat dalam dokumen. Data yang terkumpul berdasarkan jawaban narasumber/responden dikategorikan sebagai data primer, sedangkan data yang diperoleh dari berbagai dokumen sebagai data sekunder.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang memberikan data penelitian. Jika peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan data, berarti orang-orang yang memberikan jawaban/ merespon yang menjadi sumber data. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama. Artinya, penulis mengambil data langsung dari orang tua anak yang menjadi responden.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data yang termasuk kategori ini adalah daftar monografi dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

1. Jenis Instrumen

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa instrumen yang saling melengkapi satu sama lain sehingga diperoleh data yang benar-benar akurat. Adapun instrumen yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan dengan melakukan pengamatan. Sebelum melakukan observasi penulis menyusun pedoman observasi terlebih dahulu. Yang dimaksud pedoman observasi adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan proses pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban. Oleh karena itu, penulis perlu menyusun pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber tentang hal-hal yang berhubungan dengan data penelitian.

D. Variabel Penelitian

1. Definisi Konseptual

Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini meliputi pandangan orang tua tentang nilai anak (X1), persepsi pendidikan (X2), dan kondisi sosial ekonomi (X3); sedangkan variabel terikatnya program wajib belajar sembilan tahun (Y). Adapun definisi konseptual variabel tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Program wajib belajar sembilan tahun adalah program yang dicanangkan pemerintah dengan mewajibkan kepada seluruh warga negara untuk menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, yaitu enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP.
- b. Nilai anak adalah harga/keberadaan anak menurut pandangan orang tuanya. Apakah keberadaan anak hanya dilihat dari nilai positif (kepuasan, kebaikan, dan keuntungan), nilai negatif (gangguan, ongkos, beban kesulitan, dan kerugian) atau kedua-duanya.
- c. Persepsi orang tua tentang pendidikan adalah suatu pandangan orang tua dalam melihat konsep pendidikan. Artinya kemampuan orang tua dalam melihat visi dan manfaat pendidikan bagi anaknya.
- d. Kondisi sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan orang tua atau kelas orang tua dalam kehidupan bermasyarakat serta dilihat dari pendapatan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

2. Definisi Operasional

a. Implementasi program wajib belajar sembilan tahun selain terlihat dalam angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) juga terlihat dengan indikator-indikator berikut ini.

- 1) Tingkat pendidikan anak
- 2) Dukungan dan partisipasi orang tua terhadap program wajib belajar sembilan tahun

b. Pandangan Orang Tua terhadap Nilai Anak terlihat dengan indikator berikut ini.

- 1) Orang tua akan merasa puas apabila anak dapat membantu orang tua dalam bekerja.
- 2) Orang tua selalu memperhitungkan untung ruginya setelah menyekolahkan anaknya.
- 3) Orang tua mengharapkan anaknya memberikan kontribusi dalam menambah penghasilan keluarga, yakni dengan bekerja.

c. Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan terlihat dengan indikator.

- 1) Pendidikan bagi anak wanita tidak begitu penting.
- 2) Pendidikan tidak menjanjikan masa depan.
- 3) Masih banyaknya lulusan, bahkan sarjana yang masih menganggur.
- 4) Dengan bersekolah biasanya anak akan malas bekerja untuk membantu orang tua.
- 5) Asal anak sudah bisa membaca dan menulis sudah cukup dan tak perlu melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

d. Kondisi Sosial dan Ekonomi Orang tua

- 1) Pendapatan orang tua.
- 2) Penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Miskinnya akan hal-hal kebendaan.
- 4) Kondisi rumah tangga kurang harmonis.
- 5) Pendidikan orang tua yang rendah.
- 6) Tempat tinggal yang masih terpencil dan jauh dari jangkauan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data penelitian ini berupa jawaban narasumber yang dikuantifikasikan dalam bentuk angka-angka. Di samping itu, juga berupa keterangan-keterangan yang terdapat dalam dokumen. Data yang terkumpul berdasarkan jawaban narasumber/responden dikategorikan sebagai data primer, sedangkan data yang diperoleh dari berbagai dokumen sebagai data sekunder.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang memberikan data penelitian. Jika peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan data, berarti orang-orang yang memberikan jawaban/ merespon yang menjadi sumber data. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama. Artinya, penulis mengambil data langsung dari orang tua anak yang menjadi responden.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data yang termasuk kategori ini adalah daftar monografi dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

1. Jenis Instrumen

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa instrumen yang saling melengkapi satu sama lain sehingga diperoleh data yang benar-benar akurat. Adapun instrumen yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan dengan melakukan pengamatan. Sebelum melakukan observasi penulis menyusun pedoman observasi terlebih dahulu. Yang dimaksud pedoman observasi adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan proses pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban. Oleh karena itu, penulis perlu menyusun pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber tentang hal-hal yang berhubungan dengan data penelitian.

c. Quisioner

Quisioner artinya daftar pertanyaan yang akan dijawab secara tertulis oleh orang tua anak yang menjadi responden.

2. Validitas dan Realibilitas Instrumen

Agar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid, dilakukan uji validitas. Uji validitas yang penulis gunakan yaitu validitas isi. Cara pengukurannya yaitu dengan pikiran yang logis, meminta pendapat orang yang ahli (triangulasi) dan pengukuran dengan skala likert

Adapun reabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan konsistensi internal, yaitu dengan analisis diskriminasi item. Item yang digunakan bermodel likert yang menyuruh responden memilih jawaban. Misalnya jawaban (sangat tinggi dengan score 4, tinggi dengan score 3, sedang dengan score 2, dan rendah dengan score 1).

3. Uji Coba Instrumen

Sebelum instrumen digunakan diujicobakan terlebih dahulu pada responden yang berbeda. Jika hasil yang diperoleh memenuhi syarat validitas dan reabilitas, berarti instrumen tersebut siap digunakan.

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, populasi penelitian ini adalah seluruh karakteristik orang tua yang memiliki anak usia sekolah (7 s.d. 15), baik yang tidak

lulus SD maupun yang tidak lulus SLTP di Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Adapun jumlah orang tua tersebut adalah 985. Dengan demikian, jumlah itulah yang dijadikan populasi penelitian ini.

2. Sampel

Agar diperoleh sampel yang representatif dalam penarikan sampel dari populasi, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *probabilitas sampling* dan *nonprobabilitas sampling*. Penelitian ini menggunakan *probabilitas sampling*, yaitu random sampling atau sampling acakan sederhana (Nasution, 1991:119). Sampling acakan sederhana ini dilakukan dengan cara undian. Setiap unsur dari populasi diberi masing-masing satu nomor secara berurutan pada kertas dan dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikocok agar bercampur. Peneliti mengeluarkan satu persatu gulungan kertas sampai diperoleh jumlah yang dikehendaki. Adapun gulungan yang menjadi sampel tadi dikeluarkan sampai 100 buah. Dengan demikian, jumlah sampel yang akan dijadikan subjek penelitian ini berjumlah 100 orang tua yang memiliki anak tidak melanjutkan ke jenjang SLTP atau *drop out* sebelum lulus SLTP.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Observasi penulis lakukan untuk mengetahui variabel Y (Program Wajib Belajar Sembilan Tahun) dan X3 (Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua). Observasi dilakukan dengan melihat papan monografi dan pengamatan di lapangan. Penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang

tidak terdapat dalam daftar monografi. Oleh karena itu, penyebaran angket penulis gunakan untuk mengetahui X1 Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak), X2 (Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan), X3 (Kondisi Sosial Ekonomi), dan Y (Program Wajib Belajar Sembilan Tahun). Wawancara penulis lakukan untuk mengetahui informasi lebih mendalam atau orang tua yang tidak bisa mengisi angket. Teknik wawancara ini penulis gunakan sebagai tindak lanjut untuk mengetahui semua variabel, baik X1, X2, X3, maupun Y.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut. Adapun teknik pengolahannya adalah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan dari data yang diambil sehingga apabila terdapat kesalahan segera dapat dicek kembali.
2. *Coding*, yaitu teknik pengkategorian data yang dipandang sebagai proses mengubah data mentah menjadi bentuk-bentuk simbol atau kode,
3. *Tabulating*, yaitu proses menghitung frekuensi yang disusun melalui tabel-tabel untuk memudahkan dalam menganalisis data.

Setelah data diperoleh, peneliti akhirnya menganalisis data tersebut. Adapun bentuk analisis yang peneliti lakukan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang penulis maksudkan adalah data-data yang terkumpul berupa angka-angka untuk diolah melalui statistik sebagai simpulan.

Untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi sebagai variabel

bebas terhadap program wajib belajar sembilan tahun sebagai variabel terikat akan dianalisis dengan Koefisien Rank Kendall.

Koefisien Rank Kendall digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi atau hubungan antarvariabel X dengan variabel Y didasarkan pada ranking dalam dua rangkaian yang berurutan untuk angka yang sama. Adapun rumus korelasi Rank Kendall adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N(N-1)}}$$

Keterangan

N = Banyaknya individu atau responden yang diurutkan pada X dan Y.

S = Jumlah skor-skor + dan-1 untuk semua pasangan.

t = Koefisien korelasi Rank Kendall antara variabel X dan Y.

Apabila terdapat ranking yang sama atau kembali pada observasi skor variabel X dan Y akan berakibat mengubah pembagi pada rumus di atas sehingga rumus korelasi Rank Kendall menjadi:

$$t = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N(N-1) - T_x \frac{1}{2} N(N-1) - T_y}}$$

Dimana

$T_x = \frac{1}{2} (t-1)$, t adalah banyaknya observasi yang berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel bebas (X).

$T_y = \frac{1}{2} (t-1)$, t adalah banyaknya observasi yang berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel terikat (Y).

Untuk menguji signifikansinya dengan menggunakan rumus Z tes maka N penelitian lebih dari 10, dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{t}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

Z = nilai signifikansi

Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya pengaruh atau hubungan antara dua variabel tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Apabila $Z_o > Z_t$ pada taraf signifikansi 95%, berarti signifikan dan hipotesis diterima.
2. Apabila $Z_o < Z_t$ pada taraf signifikansi 95%, berarti signifikan dan hipotesis ditolak.

Koefisien Konkordasi Rank Kendall

Karena Konkordasi Rank Kendall digunakan untuk menentukan kecocokan menyeluruh dari kebudayaan himpunan pada Rank Kendall, maka untuk mengetahui hubungan X_1 , X_2 , X_3 dengan Y rumusnya adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{S}{\frac{1}{2} K^3 (N^3 - N) - k \sum T}$$

W = Koefisien Konkordasi Rank Kendall

S = Jumlah Kuadrat Deviasi dari Mean R_j

K = Banyaknya Himpunan Ranking Perjenjangan

N = Banyaknya Objek atau individu yang Diberi Ranking

Σ = Jumlah Harga T untuk semua ranking k

Dimana

$$S = \Sigma R_j \left[\begin{array}{c} R_j \\ \Sigma \\ N \end{array} \right]^2$$

$$T = T_{x1} + T_{y2} + T_{xy}$$

R_j = Jumlah ranking yang diberikan untuk tiap N objek

T = Korelasi

Jika terdapat angka yang sama dalam jumlah yang besar, rumus W perlu dikorelasi sebagai berikut.

Dimana:

T = banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang sama memperoleh angka yang sama untuk suatu ranking tertentu.

T = Faktor korelasi

Σ = Jumlah semua kelompok angka sama masing-masing k ranking dengan dilakukan korelasi sehubungan dengan angka yang sama.

Untuk menguji signifikansi, digunakan rumus

$$X^2 = k(N-1)w$$

X^2 = Tes chi square

W = Koefisien konkordasi Rank Kendall

Kemudian hasil perhitungan X^2 tersebut dikonsultasikan dengan harga tabel dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Jika X^2 hitung $\geq X^2$ tabel, maka hubungan yang ada dinyatakan signifikan atau berarti.
- b. Jika X^2 hitung $< X^2$ tabel, maka hubungan yang ada dinyatakan tidak signifikan atau tidak berarti.

Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mengetahui berapa persen besar pengaruhnya variabel (X_1 , X_2 , dan X_3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Y) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$KD_{X_1, X_2, X_3, Y} = (T_{X_1, X_2, X_3, Y})^2 \times 100\%$$

KD = Koefisien determinasi

T = Koefisien Rank Kendall

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Keadaan Wilayah, Masyarakat, dan Pendidikan

1. Keadaan Wilayah

Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar kabupaten Demak memiliki wilayah sekitar 487 Ha. Luas tersebut terbagi atas 262,7 daerah persawahan dan 123 Ha daerah kering. Daerah kering mencakup 57, 8 berupa tegalan, 46,6 berupa bangunan dan halaman, dan 18,6 berupa daerah kering lainnya.

Melihat data tersebut desa ini termasuk daerah yang cukup potensial, bahkan sekitar 7,19 % seluruh wilayah sekecamatan diduduki oleh Desa Kedungwarukidul. Di samping itu, dilihat dari perbandingan antara daerah persawahan dan tanah kering desa ini cenderung menambatkan kehidupan pada sektor pertanian, terutama daerah persawahan.

Daerah persawahan yang menjadi pilar utama sektor pertanian terbagi atas dua jenis. Sekitar 13,0 termasuk daerah tadah hujan dan 350,7 termasuk sawah yang menggunakan sistem irigasi. Dengan demikian, berdasarkan sistem pengairan yang digunakan pengolahan daerah persawahan dapat diklasifikasi sebagai daerah yang subur. Musim tanam yang dilakukan pun dapat maksimal, yakni minimal dua kali tiap tahun.

Sistem pemerintahan desa itu dibagi menjadi tiga dusun yang terbagi lagi menjadi lima RW dan tiga puluh RT. Setiap dusun yang terdapat di desa tersebut

dipimpin oleh seorang kepala dusun. Pembagian wilayah menjadi beberapa dusun didasarkan atas batas wilayah, bukan atas jumlah penduduk.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang berada di desa Kedungwarukidul adalah sekitar 5345 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 2653 laki-laki dan 2692 perempuan. Adapun jumlah KK -nya adalah 1436 KK. Dengan demikian, dilihat dari jumlah penduduk yang dibagi jumlah KK diperoleh rata-rata 4 jiwa/ KK. Jumlah anak di desa tersebut adalah 1864 jiwa yang terdiri atas 921 laki-laki dan 943 perempuan. Adapun anak usia sekolah (6-15) berjumlah 985 jiwa.

Sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar berupa daerah persawahan, mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah mengolah sawah. Namun, ternyata tidak semua penduduk menggarap tanahnya sendiri. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa 972 bermata pencaharian sebagai petani sendiri, 1195 buruh tani, 9 pengusaha, 531 buruh industri, 432 buruh bangunan, 356 pedagang, 109 pengangkutan, 32 PNS/ABRI, 19 orang sebagai perangkat desa, dan 12 orang pensiunan.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Demak bermata pencaharian sebagai buruh. Hal ini berarti daerah yang notabene sebagian besar wilayahnya berupa tanah persawahan ternyata sebagian besar masyarakat tidak menyandarkan hidupnya pada hasil pertanian. Mengingat, masyarakat yang menjadi petani sendiri/ mengolah tanah

Tabel 3
Kepuasan jika Anaknya dapat Membantu Orang Tua
Menghadapi Pekerjaan Banyak

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat tinggi	74	74.0
2	Tinggi	24	24.0
3	Sedang	2	2.0
4	Rendah	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.2

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atau sekitar 74 (74%) dari 100 responden memiliki rasa kepuasan sangat tinggi jika anaknya yang berusia 7-15 tahun dapat membantu bekerja saat menghadapi pekerjaan yang banyak dan hanya 2 (2%) memiliki rasa kepuasan yang sedang. Hal ini berarti anak dipandang memiliki nilai yang tinggi dan akan memberikan kepuasan yang sangat tinggi apabila dapat membantu bekerja saat menghadapi pekerjaan yang banyak. Sebaliknya, anak akan memiliki nilai yang rendah atau tak menimbulkan kepuasan orang tua apabila tidak dapat membantu orang tua saat menghadapi pekerjaan yang banyak meskipun anak mereka masih berusia sekolah, yakni antara 7-15 tahun. Jadi, semakin besar kontribusi anak dalam membantu orang tua semakin besar pula rasa kepuasan orang tua.

Tabel 4
Keuntungan setelah Menyekolahkan Anak

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat tinggi	9	9.0
2	Tinggi	15	15.0
3	Sedang	76	76.0
4	Rendah	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.3

Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atau sekitar 76 (76%) dari 100 responden memiliki keuntungan yang sedang setelah menyekolahkan anak dan hanya 9 (9%) memiliki keuntungan yang sangat tinggi. Hal ini berarti keuntungan menyekolahkan anak tidak begitu tinggi. Menyekolahkan anak bagi sebagian besar mereka dianggap hanya sekedar supaya bisa membaca dan menulis, selebihnya tak memiliki keuntungan yang berarti. Jadi, menyekolahkan anak bagi mereka selalu dipertimbangkan segi keuntungannya dan kerugiannya.

Tabel 5

Kerugian ketika Panen Tiba karena Anaknya Sekolah

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat tinggi	74	74.0
2	Tinggi	25	25.0
3	Sedang	1	1.0
4	Rendah	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.4

Dalam tabel 5 tersebut terlihat bahwa sebagian besar atau sekitar 74 (74%) dari 100 responden merasa rugi saat panen tiba yang seharusnya anak-anak dapat membantu menuai hasil panen, tetapi anak-anak mereka bersekolah dan hanya 1 (1%) kerugian mereka sedang/kurang begitu rugi. Hal ini berarti anak dipandang memiliki nilai yang tinggi apabila dapat membantu bekerja saat panen tiba. Sebaliknya, anak akan memiliki nilai yang rendah apabila tidak dapat membantu orang tua dalam memanen hasil pertanian meskipun anak mereka masih berusia sekolah, yakni antara 7-15 tahun. Jadi, semakin besar kontribusi anak dalam membantu orang tua semakin tinggi nilai anak.

Tabel 6

Harapan Peran Anak

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat tinggi	0	0.0
2	Tinggi	89	89.0
3	Sedang	8	8.0
4	Rendah	3	3.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.5

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar atau sekitar 89 (89%) dari 100 responden memiliki harapan yang tinggi jika anaknya setelah dewasa dapat membantu dalam menambah penghasilan dan hanya 3 (3%) memiliki harapan yang rendah. Hal ini berarti anak dipandang memiliki nilai yang tinggi dan akan memberikan peranan yang tinggi apabila setelah menginjak dewasa dapat membantu orang tua dalam menambah penghasilan. Sebaliknya, anak akan memiliki nilai yang rendah apabila tidak dapat membantu orang tua dalam menambah penghasilan setelah menginjak dewasa. Jadi, semakin besar kontribusi anak dalam menambah penghasilan orang tua semakin tinggi pula perannya.

Tabel 7

Keinginan Ikut Merasakan Penghasilan Anak

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat tinggi	0	0.0
2	Tinggi	76	76.0
3	Sedang	24	24.0
4	Rendah	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.6

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar atau sekitar 76 (76%)

dari 100 responden memiliki keinginan yang tinggi untuk ikut merasakan penghasilan anaknya setelah bekerja dan 24 (24%) memiliki keinginan yang sedang. Hal ini berarti anak dipandang memiliki nilai yang tinggi apabila dapat memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tua. Sebaliknya, anak akan memiliki nilai yang rendah apabila tidak dapat memberikan sebagian penghasilannya setelah bekerja. Jadi, semakin tinggi nilai semakin besar pula kemampuan dan kemauannya memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tua setelah bekerja.

b. Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan

Persepsi orang tua tentang pendidikan merupakan anggapan orang tua dalam memenadang fungsi pendidikan bagi anaknya. Oleh karena itu, persepsi tersebut dapat diamati dari cara orang tua dalam menilai arti penting belajar bagi

anak-anaknya dan dapat pula dilihat dari cara memahami nilai fungsional pendidikan bagi masa depan anaknya.

Berdasarkan penyebaran angket diperoleh data-data yang dapat dijabarkan dalam tabel tunggal berikut ini.

Tabel 8

Perhatian terhadap Pendidikan Anak Wanita

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Rendah	70	70.0
2	Sedang	30	30.0
3	Tinggi	0	0.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
Total		100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 7

Sebagian besar atau sekitar 70 (70%) dari 100 responden ternyata memiliki perhatian yang rendah terhadap pendidikan anak wanita dan hanya 30 (30%) memiliki perhatian yang sedang. Hal ini berarti pendidikan pada anak perempuan menurut sebagian besar orang tua dianggap tidak begitu perlu. Hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan peneliti dengan responden sebagian besar mereka berlatasan karena anak perempuan asal bisa membaca dan menulis sudah cukup. Jadi, menurut mereka anak perempuan setelah lulus SD dianggap cukup dan tak perlu melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

Pentingnya Menyekolahkan Anak Wanita

Tabel 9

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Rendah	74	74.0
2	Sedang	25	25.0
3	Tinggi	1	1.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.8

Setelah melihat tabel 9 di atas dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar atau sekitar 74 (74%) dari 100 responden ternyata memiliki pandangan yang rendah terhadap tentang pentingnya menyekolahkan anak wanita dan hanya 1 (1%) memiliki perhatian yang tinggi. Hal ini berarti pendidikan pada anak perempuan menurut sebagian besar orang tua dianggap tidak begitu penting. Dengan demikian, menurut mereka anak perempuan tak perlu sekolah tinggi-tinggi karena paling-paling mereka juga akan menjadi ibu rumah tangga.

Tabel 10

Anggapan Wanita Kelak selalu Menjadi Tanggung Jawab Pria

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	0	0.0
2	Setuju	80	80.0
3	Ragu-ragu	7	7.0
4	Tidak setuju	13	13.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.9

Bertolak dari daftar distribusi frekuensi di atas dapat penulis paparkan bahwa sebagian besar atau sekitar 80 (80%) dari 100 setuju dengan adanya pandangan bahwa anak wanita kelak menjadi tanggung jawab pria dan hanya 13 (13%) tidak setuju terhadap pandangan tersebut. Tingginya anggapan tersebut karena menurut sebagian besar orang tua setelah seorang wanita berkeluarga yang menjadi penopang kehidupan keluarga yang utama adalah suami, seorang wanita hanyalah sebagai pendamping dan bila bekerja hanya sebagai tambahan atas penghasilan suami. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu melanjutkan sekolah yang tinggi-tinggi seperti anak pria.

Tabel 11

Pendidikan Tidak dapat Menjamin Bekerja

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju	77	77.0
2	Setuju	21	21.0
3	Ragu-ragu	2	2.0
4	Tidak setuju	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kues no.10

Dalam tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar atau sekitar 77 (77%) dari 100 responden menyatakan sangat setuju terhadap anggapan bahwa pendidikan tidak dapat menjamin untuk bisa bekerja dan hanya 2 (2%) menjawab ragu-ragu, bahkan tak ada yang tak setuju dengan anggapan tersebut. Adanya anggapan seperti ini akan berdampak pada pandangannya dalam menyekolahkan anak. Mereka merasa enggan, bahkan tidak menaruh perhatian yang serius terhadap pendidikan anak. Mengingat, dengan menyekolahkan anak sampai pada pendidikan tinggi akhirnya juga tidak menjamin untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel 12

Pendidikan Bukan Tolak Ukur Bekerja menjadi PNS

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	0	0.0
2	Setuju	58	58.0
3	Ragu-ragu	35	35.0
4	Tidak setuju	7	7.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 11

Dalam tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar atau sekitar 58 (58%) dari 100 responden menyatakan setuju terhadap anggapan bahwa pendidikan tidak dapat menjamin untuk bisa bekerja dan hanya 7 (7%) menjawab tidak setuju dengan anggapan tersebut. Anggapan ini ada nilai positifnya jika menjadi PNS bukanlah target dalam menyekolahkan anak. Akan tetapi, jika orientasi mereka bahwa agar setelah anaknya lulus dapat menjadi pegawai negeri, tentu akan mempengaruhi pada minat mereka. Sebagian besar orang tua justru merasa enggan menyekolahkan anaknya setelah melihat bahwa untuk menjadi PNS sekarang amat sulit.

Pendidikan Tidak akan Menjadikan Orang Kaya

Tabel 13

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	2	2.0
2	Setuju	29	29.0
3	Ragu-ragu	64	64.0
4	Tidak setuju	5	5.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 12

Anggapan selama ini yang berkembang di masyarakat yaitu keberhasilan seseorang selalu diukur dengan kekayaan. Seseorang dianggap berhasil apabila kekayaan mereka melimpah ruah, namun pada bidang yang lain tak begitu dipertimbangkan. Melihat kenyataan seperti ini setelah dilakukan analisis dapat dipaparkan bahwa sebagian besar orang tua atau sekitar 29 (29%) menyatakan setuju bahwa pendidikan tidak menjanjikan kekayaan. Dan hanya 5 (5%) menyatakan setuju. Hal ini didasri oleh adanya alasan bahwa banyak contoh orang kaya raya, tetapi mereka hanya sekolah sampai di SD. Namun mereka mampu berwiraswasta, sedangkan mereka yang lulusan perguruan tinggi hidupnya pun hanya pas-pasan. Adanya anggapan ini akan memiliki dampak yang negatif terhadap pendidikan anak. Sebagian orang tua akhirnya memiliki anggapan bahwa sekolah tinggi tidak begitu perlu. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana melatih mereka dan mewarisi

mereka agar bisa berusaha dan dapat memperoleh kekayaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggapnya sukses.

Tabel 14

Sekolah Tidak Perlu karena yang Studi Lanjut Sudah Banyak

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	1	1.0
2	Setuju	23	23.0
3	Ragu-ragu	70	70.0
4	Tidak setuju	6	6.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 13

Setelah dilakukan penyebaran angket sebagian besar orang tua atau sekitar 23 (23%) menyatakan setuju adanya anggapan bahwa sekolah yang tinggi tidak perlu, karena yang studi lanjut sudah banyak, dan hanya 6 (6%) menyatakan tidak setuju, sementara itu ada 70 % menyatakan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan budaya Jawa "harimo ing pandum" yang melekat pada sebagian orang tua. Mereka beranggapan biarlah yang sekolah dan yang memimpin orang-orang yang kaya saja, sementara dirinya tak akan mengubah nasib. Adanya anggapan ini akan memiliki dampak yang negatif terhadap pendidikan anak. Sebagian orang tua akhirnya memiliki

anggapan bahwa sekolah tinggi tidak begitu perlu. Yang terpenting menurutnya adalah asal sudah lulus SD dianggap sudah memiliki pendidikan yang cukup.

Tabel 15

Sekolah Tinggi Tak Perlu karena Banyak Lulusan Sulit Cari Kerja

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	0	0.0
2	Setuju	64	64.0
3	Ragu-ragu	36	36.0
4	Tidak setuju	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 14

Anggapan selama ini yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang berhasil adalah setelah lulus sekolah langsung dapat pekerjaan, termasuk para anak yang memiliki studi lanjut. Anggapan ini sebenarnya keliru karena fungsi utama bersekolah adalah menambah ilmu dan wawasan. Dengan bekal ilmu dan wawasan itulah seseorang akan dapat mengatasi hidupnya sendiri dan dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Melihat kenyataan seperti ini setelah dilakukan penyebaran angket sebagian besar orang tua atau sekitar 64 (64%) menyatakan setuju adanya anggapan bahwa sekolah tinggi tak perlu, karena banyak anak yang berstudi lanjut tetap sulit cari kerja, dan 36 (36%) menyatakan ragu-ragu. Hal ini didasari oleh

adanya alasan bahwa banyak contoh para sarjana ternyata juga sulit cari kerja, akibatnya mereka hanya menganggur atau bekerja apa adanya seperti halnya mereka yang tak bersekolah, baik menjadi tukang ojek, menggarap sawah, jadi makelar, dan lain-lain. Adanya anggapan ini akan memiliki dampak yang negatif terhadap pendidikan anak. Sebagian orang tua akhirnya memiliki anggapan bahwa sekolah tinggi tidak perlu tinggi-tinggi. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana anak itu dapat bekerja.

Tabel 16

Pendidikan Perlu meskipun yang Studi Lanjut Sulit Cari Kerja

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju	38	58.0
2	Setuju	37	37.0
3	Ragu-ragu	5	5.0
4	Tidak setuju	20	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.15

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sebagian besar orang tua belum menyadari akan pentingnya pendidikan. Hal ini didasari oleh adanya kenyataan yang selama ini mereka lihat bahwa meskipun sekolah tetap sulit cari kerja, tidak menjamin kekayaan, dan alasan lainnya. Oleh karena itu, setelah dilakukan penyebaran angket menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% menyatakan sangat setuju adanya anggapan

bahwa pendidikan perlu meskipun banyak yang berstudi lanjut tetap sulit cari kerja. Mereka yang beranggapan seperti ini karena mendapat pekerjaan bukanlah satu-satunya tujuan menyekolahkan anak. Namun, ada sekitar 20 orang menyatakan tidak setuju dengan anggapan tersebut karena memang tolok ukur menurut mereka adalah dengan sekolah yang tinggi tentu akan mendapatkan pekerjaan yang layak, enak, dan menjanjikan masa depan. Anggapan yang berkembang tersebut akan memberikan pengaruh orang tua dalam memperhatikan pendidikan anak. Sebagian orang tua akhirnya rasa keoptimisannya menyekolahkan anak akan semakin berkurang.

Tabel 17

Anak Sekolah akan Menyita Waktu

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	0	0.0
2	Setuju	50	50.0
3	Ragu-ragu	49	49.0
4	Tidak setuju	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.16

Sesuai dengan deskripsi tabel tersebut bahwa sebagian besar atau sekitar 50% menyatakan setuju bahwa anak bersekolah menyita waktu untuk membantu pekerjaan, dan hanya 1 (1%) tidak setuju. Hal ini berarti pendidikan anak sudah tidak

mendapatkan perhatian yang serius. Orang tua ternyata lebih mengedepankan pekerjaannya dengan melibatkan anak agar dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membantu mengais rezeki.

Tabel 18

Sekolah akan Menyebabkan Malas

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	0	0.0
2	Setuju	47	47.0
3	Ragu-ragu	53	53.0
4	Tidak setuju	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.17

Karena tenaga anak sangat dibutuhkan dalam membantu orang tua dalam mengatasi pekerjaannya, maka mereka beranggapan bahwa anak setelah bersekolah hanya akan menjadi malas. Jika mereka disuruh membantu tidak mau alasannya akan belajar atau mengerjakan pekerjaan sekolah lainnya. Hal ini sesuai dengan penemuan angket yang menyatakan bahwa sekitar 47 (47%) dari 100 responden setuju terhadap anggapan bahwa sekolah akan menyebabkan malas membantu orang tua dan tanpa ada yang tidak setuju atas anggapan tersebut, sementara ada juga yang ragu-ragu, yaitu sekitar 53 %.

Tabel 19

Anak Sudah Bisa Baca, Tidak Perlu Melanjutkan Sekolah

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	0	0.0
2	Setuju	63	63.0
3	Ragu-ragu	32	32.0
4	Tidak setuju	5	5.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.18

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sebagian besar orang tua ternyata belum memahami hakikat pendidikan. Hal ini terlihat dari jawaban responden. Dari 100 responden sekitar 63 (63%) menyatakan setuju adanya anggapan bahwa anak sudah bisa membaca, maka tidak perlu melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dan hanya sekitar 5 (5%) menyatakan tidak setuju. Mereka juga beranggapan bahwa kehidupan seseorang asal sudah bisa membaca sudah dianggap cukup. Pendek kata, asal tidak lagi buta huruf. Fenomena semacam ini akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Mereka tidak lagi memiliki keinginan lain yang sebenarnya sangat penting dimiliki oleh anaknya yang memiliki masa depan.

Tabel 20

Anak Sudah Bisa Menulis Tidak Perlu Sekolah

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat setuju setuju	0	0.0
2	Setuju	63	63.0
3	Ragu-ragu	32	32.0
4	Tidak setuju	5	5.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.19

Di samping itu, sebagian besar orang tua juga memiliki anggapan yang salah tentang hakikat pendidikan. Hal ini terlihat dari jawaban responden. Dari 100 responden sekitar 63 (63%) menyatakan setuju adanya anggapan bahwa anak sudah bisa menulis, maka tidak perlu melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dan hanya sekitar 5 (5%) menyatakan tidak setuju. Mereka juga beranggapan bahwa kehidupan seseorang asal sudah bisa menulis dan berhitung sudah dianggap cukup. Pendek kata, asal tidak lagi buta huruf. Fenomena semacam ini juga akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Mereka tidak lagi memiliki keinginan lain yang sebenarnya sangat penting dimiliki oleh anaknya yang memiliki masa depan.

c. Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua (X3)

Kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan keadaan atau status orang tua dan keadaan ekonomi orang tua anak. Kondisi ini dihubungkan dengan kemampuan menyekolahkan anaknya.

Setelah dilakukan penyebaran angket dan analisis data tentang kondisi sosial ekonomi orang tua anak di Desa Kedungwarukidul, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak dapat dideskripsikan dalam tabel-tabel berikut ini

Tabel 21

Jumlah Penghasilan Utama

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Lebih dari Rp. 2.000.000	0	0.0
2	Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	11	11.0
3	Rp. 300.000 – Rp. 1000.000	48	48.0
4	Kurang dari 300.000	41	41.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.20

Berdasarkan tabel 21 tersebut dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar penghasilan orang tua murid putus sekolah atau tidak tamat sampai dengan SLTP di Desa Kedungwarukidul berpenghasilan rendah. Hal ini terlihat bahwa ada 48 (48%) berpenghasilan antara 300.000 – 1.000.000, yang kurang dari 300.000 berjumlah 41

(41%) dan yang berpenghasilan di atas 1.000.000 hanya 11 (11%) dari 100 responden. Kecilnya pendapatan tersebut akan berpengaruh pada pendidikan anak, terutama dalam menanggung biaya. Jangankan bisa membeli peralatan yang memadai, untuk makan saja mungkin terasa berat lebih-lebih setelah datangnya krisis moneter seperti sekarang ini. Oleh karena itu, perhatian orang tua sebagian besar hanya disibukkan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara itu urusan pendidikan anak dinomorduakan.

Tabel 22

Perbandingan Biaya Hidup Keluarga dengan Penghasilan

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat tinggi	10	10.0
2	Tinggi	43	43.0
3	Sedang	47	47.0
4	Rendah	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.21

Kecilnya penghasilan akan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Apalagi setelah krisis moneter melanda Indonesia yang akan berpengaruh pada bahan-bahan kebutuhan pokok manusia. Mereka yang berekonomi pas-pasan akan benar-benar merasakan dampak ini, yaitu merasa kebatasan dalam menghadapi biaya hidup. Hal ini sesuai dengan hasil penyebaran angket seperti dalam tabel di atas, yakni sekitar 10 (10%) mengatakan bahwa kebutuhan hidup mereka sangat tinggi dibandingkan

dengan penghasilan, 43 (43%) menyatakan tinggi, 47 (47%) menyatakan sedang, dan tidak ada yang menyatakan biaya hidupnya rendah. Hal ini jelas akan berdampak pada pendidikan anak. Orang tua tentu akan semakin berat menanggung beban biaya pendidikan, baik membeli peralatan maupun membayar BP 3. Penghasilan yang diperolehnya sebagian besar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 23

Kesesuaian pengeluaran dengan penghasilan

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Tidak sesuai	41	41.0
2	Sedang	59	59.0
3	Sesuai	0	0.0
4	Sangat sesuai	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.22

Kecilnya penghasilan yang dibandingkan dengan pengeluaran sebagian besar orang tua mengatakan tidak sesuai. Hal ini terlihat dalam tabel di atas bahwa sekitar 41 (41%) menyatakan ketidaksesuaian antara penghasilan dan pengeluaran dan tidak ada satu pun yang menjawab sesuai atau sangat sesuai. Ketidaksesuaian ini berdasarkan hasil wawancara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya gaji yang diterima (UMR tidak sesuai), harga-harga kebutuhan pokok naik, dan kebiasaan

hidup konsumtif. Kondisi semacam ini tentu akan berdampak pada pendidikan anak, yakni mereka akan merasa berat mengatasi biaya pendidikan anak.

Tabel 24

Keadaan Tempat Belajar

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Tidak mendukung	62	62.0
2	Cukup mendukung	31	31.0
3	Mendukung	7	7.0
4	Aangat mendukung	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.23

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar keadaan tempat belajar anak tidak mendukung untuk belajar. Hal ini terlihat bahwa sekitar 62 (62%) menyatakan tidak mendukung dan hanya 7 (7%) menyatakan mendukung. Berdasarkan pernyataan tersebut didasari adanya kondisi bahwa sebagian besar anak tak memiliki ruang tersendiri. Tempat belajar sama dengan tempat makan/ ruang tamu. Bahkan kadang-kadang ruang tamu yang digunakan sebagai tempat belajar bercampur dengan ruang untuk melihat televisi bagi yang punya. Bagaimana mungkin anak dapat belajar dengan baik kalau mereka bercampur dengan orang tua atau tetangga-tetangga yang ikut menonton televisi.

Tabel 25

Sarana Penunjang Belajar Anak

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Tidak lengkap	62	62.0
2	Cukup lengkap	31	31.0
3	Lengkap	7	7.0
4	Sangat lengkap	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.24

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar atau sekitar 62 (62%) tidak lengkap dan hanya 7 (7%) yang lengkap. Ketidaklengkapan sarana penunjang belajar salah satu faktornya adalah ketidakmampuan orang tua. Adanya ketidaklengkapan tersebut tentu akan mengganggu proses belajar anak. Anak akan merasa enggan belajar atau merasa kesulitan karena fasilitas yang lengkap.

Tabel 26

Frekuensi Pertengkaran antara Suami dan Istri

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat sering	0	0.0
2	Sering	13	13.0
3	Kadang-kadang	85	85.0
4	Tidak pernah	2	2.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.25

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa ada 13 (13%) mengatakan sering bertengkar antara suami istri dan 85 (85%) menyatakan hanya kadang-kadang. Hal ini berarti kondisi sosial, terutama keharmonisan keluarga cukup kondusif dalam arti faktor ini tidak memberikan pengaruh berarti pada pendidikan anak secara keseluruhan.

Tabel 27

Pernah/ tidak cerai

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat sering	0	0.0
2	Sering	0	0.0
3	Pernah	6	6.0
4	Tidak pernah	94	94.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.26

Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa sebagian besar orang tua atau sekitar 94 (94%) menyatakan tidak pernah cerai, sedangkan yang pernah cerai hanya sekitar 6 (6%) yang pernah. Hal ini berarti kondisi sosial, terutama keharmonisan keluarga cukup kondusif dalam arti faktor ini tidak memberikan pengaruh berarti pada pendidikan anak secara keseluruhan.

Sebagian besar atau sekitar 45 (45%) perhatian orang tua terhadap proses belajar anak rendah dan 55 (55%) sedang. Hal ini berarti dukungan dan perhatian terhadap pendidikan anak sangat kecil. Fenomena ini terjadi karena sebagian orang tua mengutamakan pencarian nafkah dan perhatian terhadap pendidikan anak dinomorduakan. Akibatnya, sebagian orang tua akan memiliki sikap masa bodoh. Anak belajar atau tidak tak pernah dipermasalahkan, bahkan jika tak belajar ditegur pun tidak.

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.27

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Rendah	45	45.0
2	Sedang	55	55.0
3	Tinggi	0	0.0
4	Sangat tinggi	0	0.0
	Total	100	100.0

Perhatian terhadap Belajar Anak

Tabel 28

Tabel 29

Pendidikan Formal Terakhir

NO	KATEGORI	FREK	%
1	SD	80	80.0
2	SLTP	17	17.0
3	SMU	3	3.0
4	Perguruan Tinggi	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.28

Melihat tabel tersebut dapat penulis deskripsikan bahwa sebagian orang tua anak di desa Kedungwarukidul sangat rendah. Hal ini terlihat bahwa 80 (80%) hanya lulusan SD, 17 (17%) lulusan SLTP, dan hanya 3 orang yang menyatakan lulusan SMU. Dengan demikian lemahnya dukungan terhadap program wajib belajar sembilan tahun salah satu sebabnya adalah kurangnya wawasan tentang pendidikan karena pendidikan orang tua sendiri yang rendah.

Tabel 30

Dukungan Pendidikan Orang Tua

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Tidak mendukung	51	51.0
2	Cukup mendukung	14	14.0
3	Mendukung	35	35.0
4	Sangat mendukung	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.29

Rendahnya pendidikan orang tua ternyata berpengaruh pada proses belajar anak. Hal ini terbukti dengan adanya benyebaran angket. Dari 100 responden menyatakan bahwa sebagian besar atau sekitar 51 (51%) pengetahuan yang dimiliki tidak sesuai dan tidak mendukung dalam ikut menyelesaikan kesulitan belajar yang dihadapi oleh anak. Jika anak mendapatkan PR dan menemui kesulitan orang tua tak mampu membantunya. Apa yang diperolehnya dulu di bangku sekolah tidak lagi sesuai dengan pelajaran yang dihadapi oleh anaknya.

Tabel 31

Jarak Rumah dengan Sekolah

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat jauh	0	0.0
2	Jauh	26	26.0
3	Sedang	74	74.0
4	Dekat	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.30

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar atau sekitar 26 (26%) menyatakan bahwa jarak antara rumah dengan sekolah anak sangat jauh dan 74 (74%) sedang. Anak yang memiliki jarak jauh tersebut adalah sebagian besar mereka yang pernah bersekolah di SLTP. Hal ini terjadi karena jumlah SLTP di kecamatan hanya dua buah dan harus ditempuh dengan naik sepeda atau jalan kaki.

Tabel 32

Transportasi

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Tidak ada	35	35.0
2	Kadang-kadang ada/jarang	65	65.0
3	Banyak	0	0.0
4	Sangat banyak	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.31

Berdasarkan hasil penyebaran yang telah dirangkum dalam tabel dapat penulis deskripsikan bahwa sebagian atau sekitar 35 (35%) orang tua menyatakan bahwa transportasi yang menghubungkan ke sekolah tempat anak belajar tidak ada dan 65 (65%) menyatakan jarang. Hal ini berarti fasilitas yang mendukung terhadap program wajib belajar sembilan tahun kurang, terutama transportasi yang menghubungkan antara desa Kedungwarukidul dengan SLTP tempat anak belajar.

Tabel 33

Ongkos Transportasi

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Sangat mahal	19	19.0
2	Mahal	81	81.0
3	Sedang	0	0.0
4	Murah	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.32

Kurangnya alat transportasi yang menghubungkan ke SLTP tempat anak belajar mengakibatkan mahal biaya transportasi. Hal ini terbukti dengan adanya penyebaran angket bahwa sekitar 19 (19%) menyatakan sangat mahal dan 81 (81%) dari 100 responden menyatakan mahal. Mahalnya transportasi berarti akan berpengaruh terhadap kemampuan orang tua dalam memberikan dukungan padan pendidikan anak.

d. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Y)

Program Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program pemerintah di bidang pendidikan. Program ini menekankan bahwa batas pendidikan yang wajib dimiliki warga negara adalah SD dan SLTP. Oleh karena itu, maksud program ini adalah mewajibkan anak bersekolah enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP. Berdasarkan penyebaran angket dari 100 responden diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 34

Tingkat Pendidikan Anak

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Tidak bersekolah	7	7.0
2	Tidak lulus/putus sekolah di SD	56	56.0
3	Tidak melanjutkan ke SLTP	37	37.0
4	Tidak lulus/putus sekolah di SD	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.33

Berdasarkan penyebaran angket pada orang tua yang anaknya tidak memiliki pendidikan sampai tamat SLTP dapat diperoleh data sebagai berikut. Dari 100 responden sebagian besar atau sekitar 56 (56%) ternyata tidak lulus/putus sekolah di SD dan 37 (37%) tidak melanjutkan ke jenjang SLTP. Namun, yang menjadi perhatian ternyata masih ada sekitar 7 (7%) tidak pernah bersekolah. Hal ini berarti program

wajib belajar sembilan tahun yang dilaksanakan belum memenuhi target yang diharapkan.

Tabel 35

Tindakan terhadap Anak Perempuan yang Sudah Dewasa

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Dikawinkan jika ada pria yang melamar	32	32.0
2	Diminta bekerja dan tidak perlu melanjutkan	62	62.0
3	Memberi kesempatan masuk SLTP kalau mau	6	6.0
4	Tetap menyekolahkan ke SLTP	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.34

Berdasarkan angket tersebut terlihat bahwa dari 100 responden ada sekitar 32 (32%) orang tua menyatakan bahwa setelah anaknya sudah lulus SD atau sudah cukup besar akan dikawinkan jika ada pria yang melamar, 62 (62%) mengambil sikap meminta anak bekerja saja dan tidak perlu melanjutkan ke SLTP, dan hanya 6 (6%) yang memberi kesempatan melanjutkan ke jenjang SLTP. Hal ini berarti dukungan orang tua terhadap pendidikan anak perempuan sangat rendah, terutama dalam ikut menyekeskan program wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 36

Tindakan Anak yang Sudah Iulus SD

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Menyuruh bekerja saja karena melanjutkan ke SLTP tak ada gunanya	24	24.0
2	Masa bodoh, mau sekolah terserah, tidak juga terserah	62	62.0
3	Menawari/ memberi kesempatan masuk SLTP kalau mau	14	14.0
4	Tetap menyekolahkan ke SLTP	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.35

Berdasarkan angket tersebut terlihat bahwa dari 100 responden ada sekitar 24 (24%) orang tua menyatakan bahwa lebih baik bekerja saja karena melanjutkan ke SLTP tak ada gunanya, 62 (62%) bersikap masa bodoh, mau melanjutkan terserah tidak juga terserah, dan hanya 14 (14%) yang memberi kesempatan melanjutkan ke jenjang SLTP. Hal ini berarti dukungan orang tua terhadap pendidikan anak sangat rendah, terutama dalam ikut menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 37

Tindakan Anak yang Suka Membolos

NO	KATEGORI		FREK	%
1	Masa bodoh, akan sekolah terserah, tidak juga terserah	44	44.0	
2	Mengajak pembantu pekerjaan di sawah/ ladang	38	38.0	
3	Menanyakan kepadanya mengapa membolos	18	18.0	
4	Memperingatkan dan meminta supaya masuk sekolah	0	0.0	
	Total	100	100.0	

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.36

Rendahnya dukungan orang tua dengan program wajib belajar sembilan tahun juga terlihat dalam perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Berdasarkan angket tersebut terlihat bahwa dari 100 responden ada sekitar 44 (44%) bersikap masa bodoh, mau sekolah terserah membolos juga terserah, 38 (38%) orang tua menyatakan bahwa lebih baik anak diajak bekerja ke sawah atau ladang saja jika membolos, dan hanya 8 (8%) yang menanyakan kepada anak mengapa mereka membolos. Hal ini berarti orang tua benar-benar bersikap masa bodoh terhadap pendidikan anak.

Tabel 38

Tindakan Adanya Program Kejar Paket B

NO	KATEGORI		FREK	%
1	Tetap mengajak bekerja karena mengikuti Program	tersebut tidak ada gunanya	16	16.0
2	Masa bodoh, mau mengikuti terserah, tidak juga	terserah	62	62.0
3	Menawarkan / memberi kesempatan apakah mau	mengikuti program itu	22	22.0
4	Meminta mereka untuk mengikuti program kejar	paket B	0	0.0
	Total		100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.37

Berdasarkan angket tersebut terlihat bahwa dari 100 responden ada sekitar 16 (16%) orang tua menyatakan bahwa lebih baik anak tetap diajak bekerja karena mengikuti program tersebut tak ada gunanya, 62 (62%) bersikap masa bodoh, mau mengikuti program tersebut terserah tidak juga terserah, dan hanya 22 (22%) yang memberi kesempatan mengikuti program itu. Hal ini berarti dukungan orang tua terhadap pendidikan anak sangat rendah, terutama dalam ikut melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 39

Tindakan tentang Tunggalan Uang BP3

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Meminta anak untuk keluar saja	16	16.0
2	Masa bodoh, membiarkan saja dan rapor tak perlu diambil	36	36.0
3	Meminta keringanan biaya	48	48.0
4	Meminta jangka waktu kepada sekolah untuk melunasinya	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.38

Berdasarkan angket tersebut terlihat bahwa dari 100 responden ada sekitar 16 (24%) orang tua menyatakan bahwa lebih baik meminta anaknya keluar saja, 36 (36%) bersikap masa bodoh, membiarkan saja dan rapor tak perlu diambil, dan 48 (48%) meminta keringanan biaya. Hal ini berarti dukungan orang tua terhadap pendidikan anak sangat rendah, terutama dalam ikut menyaksikan program wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 40

Tindakan terhadap anak yang akan melanjutkan ke SLTP tetapi jarak jauh

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Meminta anak untuk dirumah saja membantu orang tua	24	24.0
2	Masa bodoh, mau melanjutkan terserah, tidak juga terserah	62	62.0
3	Menawarkan/ memberi kesempatan kepada anak apakah mau melanjutkan atau tidak	14	14.0
4	Memintanya tetap melanjutkan ke SLTP	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.39

Berdasarkan angket tersebut terlihat bahwa dari 100 responden ada sekitar 24 (24%) orang tua menyatakan bahwa lebih baik di rumah saja membantu orang tua, 62 (62%) bersikap masa bodoh, mau melanjutkan terserah tidak juga terserah, dan hanya 14 (14%) yang memberi kesempatan melanjutkan ke jenjang SLTP. Hal ini berarti dukungan orang tua terhadap pendidikan anak sangat rendah, terutama dalam ikut menyekskan program wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 41

Tindakan terhadap Anak yang tak mau sekolah

NO	KATEGORI	FREK	%
1	Meminta anak untuk dirumah saja membantu orang tua	24	24.0
2	Masa bodoh, mau sekolah terserah, tidak juga terserah	62	62.0
3	Menawarkan/ memberi kesempatan kepada anak apakah mau bersekolah lagi/ tidak	14	14.0
4	Memintanya supaya tetap bersekolah	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.40

Berdasarkan angket tersebut terlihat bahwa dari 100 responden ada sekitar 24 (24%) orang tua menyatakan bahwa lebih baik di rumah saja membantu orang tua, 62 (62%) bersikap masa bodoh, mau melanjutkan terserah tidak juga terserah, dan hanya 14 (14%) yang memberi kesempatan kepada anak apakah mau melanjutkan ke sekolah lagi. Hal ini berarti dukungan orang tua terhadap pendidikan anak sangat rendah, terutama dalam ikut menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

2. TABEL KATEGORI/SIMPULAN TIAP VARIABEL

Setelah deskripsi disajikan dalam masing-masing pertanyaan diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi variabel yang diteliti. Selanjutnya sebelum dilakukan uji hipotesis perlu dilakukan kategorisasi berdasarkan skor masing-masing responden yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel bebasnya terdiri atas pandangan orang tua tentang nilai anak, pandangan orang tua tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi orang tua, sedangkan variabel terikatnya adalah program wajib belajar sembilan tahun.

a. Variabel Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Y)

Tabel 1

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

No.	KATEGORI	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mendukung	31	31%
2.	Kurang mendukung	42	42%
3.	mendukung	14	14%
4.	Sangat mendukung	13	13%
	Total	100	100%

Sumber variabel Y

Berdasarkan distribusi frekuensi tersebut variabel program wajib belajar sembilan tahun dapat dideskripsi sebagai berikut. Sekitar 31% orang tua tidak

mendukung terhadap program tersebut, 42% kurang mendukung, 14% mendukung, dan 13% sangat mendukung. Dengan demikian berdasarkan distribusi frekuensi tersebut dapat diambil simpulan bahwa sebagian besar orang tua di desa Kedungwaru Kidul Karanganyar Demak samapi penelitian ini dilakukan tidak/kurang mendukung terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Artinya, pelaksanaan program tersebut belum mendapatkan dukungan yang semestinya sehingga kekurangan/berhasilan program ini salah satu penyebabnya adalah rendahnya dukungan orang tua itu sendiri.

b. Variabel Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak (X1)

Tabel 2

Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak

No.	KATEGORI	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak baik	44	44%
2.	Kurang baik	21	21%
3.	Baik	29	29%
4.	Sangat baik	6	6%
	Total	100	100%

Sumber variabel X1

Dalam tabel 2 tersebut distribusi frekuensi variabel pandangan orang tua tentang nilai anak dapat dideskripsi sebagai berikut. Sekitar 44% orang tua memiliki pandangan yang tidak baik terhadap nilai anak, 21% berpandangan kurang baik, 29% berpandangan baik, dan 6% berpandangan sangat baik. Dengan demikian berdasarkan

distribusi frekuensi tersebut dapat diambil simpulan bahwa sebagian besar orang tua di desa Kedungwaru Kidul Karanganyar Demak memiliki pandangan yang tidak baik tentang nilai anak.

c. Variabel Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan (X2)

Tabel 3

Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan

No.	KATEGORI	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak baik	20	20%
2.	Kurang baik	37	37%
3.	Baik	37	37%
4.	Sangat baik	6	6%
Total		100	100%

Sumber variabel X2

Bertolak dari distribusi frekuensi variabel persepsi orang tua tentang pendidikan dapat dideskripsi sebagai berikut. Sekitar 20% orang tua memiliki persepsi yang tidak baik terhadap pendidikan, 37% kurang baik, 37% baik, dan 6% sangat baik. Dengan demikian, berdasarkan distribusi frekuensi tersebut dapat diambil simpulan bahwa sebagian besar orang tua di desa Kedungwaru Kidul Karanganyar Demak memiliki persepsi yang tidak/kurang baik tentang pendidikan, yakni sekitar 57%, sedangkan masyarakat yang benar-benar sangat baik hanya 6%.

c. Variabel Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua (X3)

Tabel 4

Kondisi Sosial Orang Tua

No.	KATEGORI	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak mampu	14	14%
2.	Kurang mampu	42	42%
3.	mampu	36	36%
4.	Sangat mampu	8	8%
	Total	100	100%

Sumber variabel X3

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel kondisi sosial ekonomi orang tua dapat dideskripsi sebagai berikut. Sekitar 14% orang tua memiliki kondisi sosial ekonomi yang tidak mampu, 42% kondisi sosial ekonominya kurang mampu, 36% mampu, dan 8% sangat mampu. Dengan demikian berdasarkan distribusi frekuensi tersebut dapat diambil simpulan bahwa sebagian besar orang tua di desa Kedungwaru Kidul Karanganyar Demak memiliki kondisi sosial ekonomi yang tidak/kurang mampu. Artinya, kehidupan ekonomi mereka cenderung hanya cukup menghidupi keluarga, terutama makan, dan pakaian, sedangkan kebutuhan lain belum terjangkau oleh mereka.

3. Hubungan antara Pandangan Orang tua tentang Nilai anak dan Program

Wajib Belajar Sembilan Tahun

Dalam penelitian ini pandangan orang tua tentang nilai anak merupakan salah satu variabel bebas yang memiliki hubungan dengan variabel terikat, yakni program wajib belajar sembilan tahun. Sebagai variabel bebas tentu akan memiliki hubungan dengan variabel terikatnya. Artinya, Dalam kondisi tertentu variabel bebas tersebut akan memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel terikat. Hubungan kedua variabel tersebut terangkum dalam tabel berikut ini

Tabel 5

Hubungan antara Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak dan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

TOTAL_X1 Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak		Variabel bebas /				TOTAL_Y Program Wajib Belajar Sembilan Tahun				Total	
TOTAL_X1 Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak	1 tidak baik	1 kurang baik	2 baik	3 sangat baik	4 sangat baik	1 tidak mendukung	2 kurang mendukung	3 mendukung	4 sangat mendukung	44	100.0%
	17	12	1	1	1	38.6%	57.1%	3.4%	16.7%	31.0%	100.0%
	21	6	13	2	42	47.7%	28.6%	44.8%	33.3%	42.0%	100.0%
	6	1	6	1	14	13.6%	4.8%	20.7%	16.7%	14.0%	100.0%
TOTAL_Y Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Variabel terikat	/	Variabel bebas	1 tidak mendukung	2 kurang mendukung	3 mendukung	4 sangat mendukung	2	9	29	100.0%
								2	2	6	100.0%
								13	2	13	100.0%
								100	6	100	100.0%

Sumber Variabel X1 dan Y

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa hasil perhitungan korelasi Rank Kendall menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pandangan orang tua tentang nilai anak (X1) dengan variabel Y. Di samping itu, berdasarkan hasil pengujian dengan Rank Kendall's dari 100 responden menunjukkan bahwa ada 12 (57,1%) dan 21 (47,7%) responden yang memiliki pandangan tentang nilai anak tidak baik ternyata tidak/kurang memberikan dukungan terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Sebaliknya, hanya sekitar 1 (16,7%) responden memiliki pandangan tentang nilai anak sangat baik dan mendukung terhadap program tersebut. Namun demikian, ada juga sekitar 2 (33,3%) responden sangat mendukung terhadap program itu. Fenomena ini berarti besarnya dukungan tersebut disebabkan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, berdasarkan deskripsi tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin rendah/tidak baik pandangan orang tua tentang nilai anak semakin rendah/tidak mendukung

Kendall menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pandangan orang tua tentang nilai anak (X1) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,339 dengan taraf signifikansi 0,001 atau di bawah 0,05 (95%). Hal ini berarti bahwa hasil perhitungan rank Kendall membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y.

Tabel Ukuran Simetris				
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)
	.339		.072	4.571
N of Valid Cases				
a. Not assuming the null hypothesis.				
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.				

terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Sebaliknya, semakin tinggi/sangat baik pandangan orang tua tentang nilai anak semakin tinggi/sangat pendukung terhadap program tersebut.

4. Hubungan Antara Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan dan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Hubungan Antara Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan dan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam penelitian ini mendeskripsikan bahwa adanya persepsi orang tua tentang pendidikan yang tidak/kurang baik akan berdampak pada program wajib belajar sembilan tahun, yakni dengan tidak/kurang memberikan dukungan. Demikian pula semakin tinggi/sangat baik persepsi orang tua tentang pendidikan juga akan semakin tinggi/sangat mendukung terhadap program ini. Hubungan kedua variabel tersebut terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6
Hubungan antara Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan dan
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

TOTAL_X2 Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan		Variabel bebas				Variabel terikat				TOTAL_Y		Program Wajib Belajar Sembilan Tahun		Total	
		1 tidak baik	2 kurang baik	3 baik	4 sangat baik	1 tidak mendukung	2 kurang mendukung	3 mendukung	4 sangat mendukung	1 tidak mendukung	2 kurang mendukung	3 mendukung	4 sangat mendukung	1 31	2 42
Total		8	13	8	2	40.0%	35.1%	21.6%	33.3%	31.0%	42.0%	42	14	6	100
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber X2 dan Y

Tabel Ukuran Simetris					
	Value	Asymp. Std. Error(s)	Approx. T(b)	Approx. Sig.	
Ordinal by Ordinal	.095	.087	1.087	.0277	
Kendall's tau-b					
N of Valid Cases					
a Not assuming the null hypothesis.					
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.					

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa hasil perhitungan korelasi Rank Kendall menunjukkan bahwa hubungan antara variabel persepsi orang tua tentang pendidikan (X2) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,095 dengan taraf signifikansi 0,0277 atau di bawah 0,05 (95%). Hal ini berarti bahwa hasil perhitungan

rank Kendall membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y.

Berdasarkan hasil pengujian dengan Rank Kendall's dari 100 responden menunjukkan bahwa ada 8 (40,0%) responden yang memiliki persepsi tentang pendidikan tidak baik ternyata tidak/kurang memberikan dukungan terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Sebaliknya, hanya sekitar 1 (16,7%) responden memiliki pandangan tentang nilai anak sangat baik dan sangat mendukung terhadap program tersebut. Fenomena ini berarti besarnya dukungan tersebut disebabkan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, berdasarkan deskripsi tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin rendah/tidak baik persepsi orang tua tentang pendidikan semakin rendah/tidak mendukung terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Sebaliknya, semakin tinggi/sangat baik persepsi orang tua tentang pendidikan semakin tinggi/sangat mendukung terhadap program tersebut.

5. Hubungan Antara Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Hubungan Antara Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam penelitian ini mendeskripsi bahwa adanya kondisi sosial ekonomi orang tua tentang pendidikan yang tidak/kurang mampu akan berdampak pada program wajib belajar sembilan tahun, yakni dengan tidak/kurang memberikan dukungan. Demikian pula semakin tinggi/sangat mampu kondisi sosial

Hubungan antara Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

TOTAL X3 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua		Variabel bebas				Variabel terikat			
		1	2	3	4				
		tidak mampu	kurang mampu	mampu	sangat mampu				
TOTAL Y Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	tidak mendukung	28.6%	38.1%	25.0%	25.0%	42	31.0%	Total	
	kurang mendukung	4	20	14	4	42	42.0%		
	3	6	1	7		14	14.0%		
	mendukung	42.9%	2.4%	19.4%	6	2	13		
	4		5	6	2	13	13.0%		
	sangat mendukung		11.9%	16.7%	25.0%	8	100.0%	Total	
		14	42	36	8	100	100.0%		

Sumber Olahan Program SPSS

Tabel Ukuran Simetris				
	Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.087	.088	.997
N of Valid Cases		100		.0319

a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa hasil perhitungan korelasi Rank Kendall menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kondisi sosial ekonomi orang tua (X_3) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,087 dengan taraf signifikansi 0,0319 atau di bawah 0,05 (95%). Hal ini berarti bahwa hasil perhitungan

rank Kendall membuktikan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara variabel X3 dengan variabel Y.

Berdasarkan hasil pengujian dengan Rank Kendall's dari 100 responden menunjukkan bahwa ada 16 (38,1%) dan 20 (47,6) responden yang memiliki kondisi sosial ekonomi kurang mampu ternyata tidak/kurang memberikan dukungan terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Sebaliknya, hanya sekitar 2 (25,0%) responden memiliki kondisi sosial ekonomi sangat mampu dan sangat mendukung terhadap program tersebut. Fenomena ini berarti besarnya dukungan tersebut disebabkan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, berdasarkan deskripsi tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tidak/kurang mampu kondisi sosial ekonomi orang tua semakin rendah/tidak mendukung terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Sebaliknya, semakin tinggi/sangat mampu kondisi sosial ekonomi orang tua semakin tinggi/sangat mendukung terhadap program tersebut.

6. Hubungan antara Pandangan Orang tua tentang Nilai Anak, Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan, dan Kondisi Sosial Ekonomi dengan Program Wajib Belajar sembilan Tahun

Hubungan antara Pandangan Orang tua tentang Nilai Anak, Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan, dan Kondisi Sosial Ekonomi dengan Program Wajib Belajar sembilan Tahun dapat ditunjukkan melalui koefisien korelasi Kendall yang mempunyai mean rank untuk masing-masing variabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh mean $X1 = 2,24$; $X2 = 2,65$; $X3 = 2,78$; dan $Y = 2,34$.

Hubungan antara ketiga variabel bebas dengan variabel terikat akan diuji dengan Konkordasi Kendall's. Hasil perhitungan terhadap hubungan tersebut sebesar 0,50. Untuk menguji tingkatkebenaran dapat dilihat dalam nilai Chi Square sebesar 15,114 dengan taraf signifikansi 0.05 (95%) maka nilai koefisiennya sebesar 5,991. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi orang tua tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan program wajib belajar sembilan tahun. Adapun untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (W^2). Jika W^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati 100%) maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Sebaliknya, jika W^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil.

Berdasarkan perhitungan besarnya koefisien determinasi berganda (W^2) dalam penelitian ini adalah 0,25. Dengan demikian harga tersebut berada di antara 0 dan 1 atau $0 \leq W^2 (0,25) \leq 1$. Deskripsi hubungan dan hasil pengujianya secara lengkap terlihat dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 8
Hubungan antara Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak,
Persepsi tentang Pendidikan, dan Kondisi Sosial Ekonomi dengan
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Correlations							
Variabel	X1	Variabel	X2	Variabel	X3	Variabel	Y
Kendall's tau_b	Correlation	1.000	.113	-.068	.339(**)		
	Sig. (2-tailed)		.196	.437	.000		
	N	100	100	100	100		100
	Variabel	X2	Correlation	1.000	-.018	1.000	
			Sig. (2-tailed)		.837	.0276	
	Variabel	X3	Correlation	-.068	1.000	.087	
			Sig. (2-tailed)			.0316	
	Variabel	Y	Correlation	.339(**)	.095	.276	
			Sig. (2-tailed)		.000	.316	
	N						100

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Sumber Hasil Olahan Variabel X1,X2,X3, dan Y dengan Program SPSS

Kendall's W Test

Ranks	
Mean Rank	TOTAL X1
	2.24
	TOTAL X2
	2.65
	TOTAL X3
	2.78
	TOTAL Y
	2.34

Test Statistics	
N	100
Kendall's W(a)	.050
Chi-Square	15.114
df	3
Asymp. Sig.	.002
W ²	0.25

Berdasarkan olahan data pada tabel di atas dapat dipaparkan bahwa hubungan secara bersama-sama antara pandangan orang tua tentang nilai anak (X1), persepsi tentang pendidikan (X2), dan kondisi sosial orang tua (X3) dengan program wajib belajar (Y) diperoleh hasil 0,050. Hal ini berarti ada hubungan yang positif antara X1, X2, dan X3 dengan Y. Artinya, semakin besar X1, X2, dan X3 akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap Y, sebaliknya semakin kecil X1, X2, dan X3 semakin kecil pula pengaruhnya terhadap Y.

7. Diskusi

Berdasarkan pengujian hipotesis yang diuji dengan konkordasi Kendall's diperoleh hasil sebesar 0,050. Setelah diuji tingkat kebenaran dengan nilai Chi Square diperoleh 15,114 dengan taraf signifikansi 0,05 (95%) nilai koefisiennya sebesar 5,991. Dengan demikian, hubungan antara pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi orang tua tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan program wajib belajar sembilan tahun secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan.

Adapun besarnya koefisien determinasi berganda (W^2) dalam penelitian ini adalah 0,25. Harga tersebut berada di antara 0 dan 1 atau $0 \leq W^2 (0,25) \leq 1$. Dengan demikian, sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar (mendekati satu) maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar pula.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dipaparkan bahwa pandangan orang tua tentang nilai anak (X1), persepsi orang tua tentang pendidikan(X2), dan kondisi sosial ekonomi (X3) memiliki pengaruh yang positif terhadap program wajib belajar sembilan tahun (Y). Artinya, semakin besar/baik variabel X1,X2, dan X3 akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap Y. Sebaliknya, semakin kecil variabel X1,X2, dan X3 akan semakin kecil pula pengaruhnya terhadap Y.

Di samping itu, hubungan parsial tiap variabel bebas baik pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi yang diuji dengan Rank Kendall's diperoleh hasil bahwa hubungan antara pandangan orang tua dengan nilai anak (X1) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,339 dengan taraf signifikansi 0,001 atau di bawah 0,05 (95%). Hubungan antara persepsi orang tua tentang pendidikan (X2) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,095 dengan taraf signifikansi 0,0277 atau di bawah 0,05 (95%). Hubungan kondisi sosial ekonomi (X3) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,087 dengan taraf signifikansi 0,0319 atau di bawah 0,05 (95%). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat pula dipaparkan bahwa setiap variabel bebas juga memiliki pengaruh yang positif terhadap program wajib belajar sembilan tahun. Artinya setiap variabel bebas, baik pandangan orang tentang nilai anak, persepsi orang tua tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi menentukan program wajib belajar sembilan tahun.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan masalah, tujuan, dan hasil penelitian dapat penulis simpulkan

sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa hubungan antara pandangan orang tua tentang nilai anak (X1) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,339 dengan taraf signifikansi 0,001 atau di bawah 0,05 (95%). Dengan demikian, hubungan kedua variabel tersebut sangat signifikan. Hal ini berarti program wajib belajar sembilan tahun memang dipengaruhi oleh pandangan orang tua tentang nilai anak.

2. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa hubungan antara persepsi orang tua tentang pendidikan (X2) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,095 dengan taraf signifikansi 0,0277 atau di bawah 0,05 (95%). Dengan demikian, hubungan kedua variabel tersebut sangat signifikan. Hal ini berarti program wajib belajar sembilan tahun memang dipengaruhi oleh persepsi orang tua tentang pendidikan.

3. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa hubungan kondisi sosial ekonomi (X3) dengan program wajib belajar sembilan tahun (Y) adalah 0,087 dengan taraf signifikansi 0,0319 atau di bawah 0,05 (95%). Dengan demikian,

hubungan kedua variabel tersebut sangat signifikan. Hal ini berarti program wajib belajar sembilan tahun memang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orang tua. Hubungan ketiga variabel bebas, yakni pandangan orang tua tentang nilai anak, persepsi orang tua tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan program wajib belajar sembilan tahun secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan. Adapun besarnya koefisien determinasi berganda (W^2) dalam penelitian ini adalah 0,25. Harga tersebut berada di antara 0 dan 1 atau $0 \leq W^2 (0,25) \leq 1$. Dengan demikian, sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar (mendekati satu) maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar pula.

B. Saran

1. Kepada Dinas Pendidikan dan instansi terkait, hendaknya melakukan pendataan kembali pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun.

2. Kepada orang tua, hendaknya memberikan dukungan/ partisipasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dengan menyekolahkan anaknya minimal sampai pada jenjang SLTP.
3. Kepada para peneliti, hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, 1990, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Achmady, Zainal Arifin, 1994, *Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun, Minbar Pendidikan* No. 2 Th. XIII Juli, IKIP Bandung Press University, Bandung.
- Daliyo, 1998, *Pekerja Anak dan Perencanaan Pendidikan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Undang-Undang Republik Pendidikan Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penyelasaannya*, Depdikbud RI, Jakarta.
- , 1999, *Laporan Penelitian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Program Dana Bantuan Operasional*, Jakarta.
- Indriyono, Gito Sudarmo dan I Nyoman Sudito, 2000, *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta : BPFE.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Gaffar, H.M. Fakry, 1990, "Mutu Hasil Pendidikan yang Terserap oleh Lapangan Kerja: Suatu Dilema dalam Kebutuhan Tenaga Kerja", *Minbar Pendidikan* No. 2 Th. IX Juli, IKIP Bandung Press University, Bandung.
- Hardjo Soedarmo, Soewarso, 1996, *Dasar-Dasar TQM*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Hadi, S, 1994. *Analisis Regresi*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Hull, T.H., 1977, "A Review of Research on the Price, Cost and Value of Children in Indonesia", Working Paper, Yogyakarta: Population Institut Gajah Mada University.
- Imron, Ali, 1993, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta..

- Kartoyo, Azwini, 1983, *Survey Nilai Anak di Serpong*, Jakarta Kompas, 29 September 2000.
- Natsir, M., 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, 1991. *Metode Reseach*. Bandung: Jemars.
- Popenoe, David, 1971, *Sociologi*, New York: Apleton Century Crofts.
- Rosidin, Undang, 1995, *Transisi Lulusan SD ke SLTP dan Kasung Pulus Sekolah pada Sebuah Desa di Jawa Barat*, Program Pascasarjana, IKIP Jakarta..
- Simmon, John, 1977, *The Education Dilemma: Policy Issues For Developing Countries in the 1977's*, Britain Pergamon Press.
- Suyanto dan Abas, 2001, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Adi Cita, Yogyakarta.
- Sugiyono, 1977, *Metode Penelitian Administrasi*, bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandi dan Anastasia, 2001, *Manajemen Jasa*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.